

Kepentingan Ekonomi Politik Usaha Kecil di Malioboro, Yogyakarta

The Political Economy of Small Enterprises in Malioboro, Yogyakarta

Anggalih Bayu Muh Kamim

Magister Sosiologi Pedesaan, Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor

Email: anggalih.bayu@yahoo.co.id

Riwayat Artikel

Diterima: 13 Juni 2022
Direvisi: 21 Oktober 2023
Disetujui: 2 November 2023
doi: 10.22212/jp.v14i2.3981

Abstract

This study is aimed to explore the vulnerability of small enterprises in Malioboro that depend on mass tourism. The research question is how did the political economy of small enterprises in Malioboro change? Data collection was carried out by in-depth online interviews with small enterprise actors in Malioboro due to the Covid-19 pandemic situation. Data was also collected through searches of journal articles, manuscripts, government reports, online media reports, and books related to economic development of Malioboro. The results of the study show that the growth of small enterprises in Malioboro since the 18th century is related to the commodification of urban space around Pasar Gedhe. Massive development of urban infrastructure and the growth of tourism driven by the colonial government since the 19th century have encouraged the emergence of the "entrepreneurial city" phenomenon in Malioboro marked by the proliferation of small enterprises. The crisis in 1930 and the war for independence in 1945-1949 disrupted the economy in Malioboro, but did not kill small enterprises. After the 1970s, small enterprises grew and built organizations to sustain their livelihoods. Small businesses with their respective organizations seek to build connection with the ruling class to maintain their seasonal business. Small enterprises don't even hesitate to fight with each other. The clash of small enterprises is getting tougher after Malioboro's revitalization project in 2016 to maintain the image of a tourist destination, for business continuity.

Keywords: *Small Enterprises; Vulnerability; Tourism; Political Economy; Livelihood.*

Abstrak

Kajian ini bertujuan untuk menggali kerentanan usaha kecil di Malioboro yang bergantung pada turisme massal. Pertanyaan penelitian yang ingin dijawab adalah bagaimana perubahan ekonomi politik usaha kecil di Malioboro? Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam secara daring kepada pelaku usaha kecil di Malioboro disebabkan situasi pandemi Covid-19. Data dikumpulkan pula melalui penelusuran atas artikel jurnal, manuskrip, laporan pemerintahan, pemberitaan media daring dan buku yang terkait dengan perkembangan ekonomi di Malioboro. Hasil kajian menunjukkan bahwa tumbuhnya usaha kecil di Malioboro sejak abad ke 18 berkaitan dengan komodifikasi ruang perkotaan dimulai di sekitar Pasar Gedhe dan berlanjut di sekitarnya. Pembangunan infrastruktur perkotaan secara masif dan tumbuhnya turisme didorong oleh pemerintah kolonial sejak abad ke-19 telah mendorong munculnya fenomena "kota wirausaha" di Malioboro ditandai dengan maraknya usaha kecil. Krisis tahun 1930 dan perang kemerdekaan tahun 1945-1949 sempat mengganggu perekonomian di Malioboro, tetapi tak serta merta mematikan usaha kecil. Pasca tahun 1970-an, usaha kecil semakin tumbuh dan membangun organisasi untuk mempertahankan penghidupannya. Usaha kecil dengan masing-masing organisasinya berupaya membangun koneksi dengan kelas penguasa untuk mempertahankan bisnisnya dalam menjaga usahanya yang

bersifat musiman. Usaha kecil bahkan tak segan untuk berseteru dengan sesamanya dan semakin keras bertarung pasca penataan Malioboro pada tahun 2016 untuk menjaga citra destinasi wisata, demi keberlangsungan usaha.

Kata Kunci: Usaha Kecil; Kerentanan; Turisme; Ekonomi Politik; Penghidupan.

Pendahuluan

Kajian ini berupaya menggali kerentanan dari turisme massal di Kawasan Malioboro dan sekitarnya. Kerentanan yang dimaksud mengacu pada keberlangsungan ekonomi informal usaha kecil yang terdapat di Kawasan Malioboro dan sekitarnya yang sangat terkait dengan citra keamanan dan kenyamanan destinasi wisata. Penggalan kerentanan tersebut menjadi penting untuk mencegah munculnya upaya menjaga citra yang berlebihan dalam jalannya turisme massal yang justru rentan memicu konflik horizontal dengan elemen rakyat yang lain. Konflik horizontal di sisi lain rentan pula memicu ketiadaan kesadaran kelas yang membuat tak adanya aliansi kewarganegaraan dalam menghadapi kerentanan ekonomi informal yang meminggirkan rakyat kecil.

Beberapa kajian sebelumnya telah berupaya menjelaskan konteks ekonomi informal di Kota Yogyakarta yang telah memiliki beberapa bentuk kerentanan khususnya terkait pemanfaatan ruang-ruang perkotaan oleh usaha kecil yang sebenarnya tak berstatus sebagai tempat untuk berdagang. "Illegalitas" menjadi bentuk kerentanan utama dari ekonomi informal perkotaan yang menyebabkan usaha kecil tersisih dari akses kebijakan pemerintah daerah. Usaha kecil rentan menghadapi tindakan pemindahan sampai dengan pengusiran oleh aparat pemerintah.¹

Kajian lainnya melihat kerentanan yang muncul adalah usaha kecil tak memiliki organisasi untuk memperjuangkan kepentingan

¹ Aloysius Gunadi Brata, "Vulnerability Of Urban Informal Sector: Street Vendors In Yogyakarta, Indonesia," *Theoretical and Empirical Researches in Urban Management* 14 (2010): 53-56.

bersama. Keuntungan mereka dalam berusaha bergantung pula pada lamanya jam berjualan yang menyebabkan ketidakpastian batasan jam kerja untuk menunjang kesejahteraan. Konteks studi di Yogyakarta sendiri menarik untuk ditelusuri disebabkan cukup bersahabat dengan keberadaan usaha kecil dibandingkan kota-kota lain di Indonesia. Tak jarang untuk dapat bertahan, usaha kecil harus membangun koneksi dengan elit politik dalam mempertahankan keberlangsungan usahanya.

Kerentanan-kerentanan ekonomi informal Kota Yogyakarta dapat menjadi pijakan penting untuk memahami sengkabut informalitas di Kawasan Malioboro. Ruang ekonomi dan sosial di Malioboro sendiri sudah didominasi oleh kalangan konglomerat properti terutama yang berada di sebelah barat Jalan Malioboro. Kawasan sepanjang Jalan Malioboro juga sudah diisi oleh berbagai toko dan restoran. Usaha kecil sendiri berjualan di depan beranda kios-kios milik pengusaha dan pemerintah daerah. Usaha kecil di Malioboro sendiri memiliki organisasi menyesuaikan dengan kesamaan dengan produk yang dijual. Usaha kecil di Malioboro dari segi pemanfaatan ruang terbagi menjadi dua jenis yakni dengan lapak berukuran 0,75 x 1 meter dan 1,5 x 3 meter.² Berangkat dari konteks inilah dapat dipahami bahwa perebutan sumber daya ekonomi dan ruang benar adanya telah terjadi di Malioboro, sehingga kajian ini ingin mendalami lebih lanjut proses pergulatan ekonomi politik tersebut.

Kajian ini berupaya menjawab pertanyaan penelitian yakni "Bagaimana perubahan
² Dallen J. Timothy and Geoffrey Wall, "Selling To Tourists Indonesian Street Vendors," *Annals of Tourism Research* 24, no. 2 (1997): 329-335.

ekonomi politik usaha kecil di Kawasan Malioboro?" Kajian ini akan dibagi menjadi tiga sub pembahasan. *Pertama*, penggalian atas pergulatan ekonomi politik sejak bergeliatnya ekonomi informal di Malioboro sampai tahun 1970-an. *Kedua*, pasca kemerdekaan dengan menggeliatnya turisme sampai proyek penataan pada tahun 2016. *Ketiga*, pendalaman perebutan ruang dan sumber daya ekonomi di Malioboro pasca proses penataan sampai dengan saat terjadinya pandemi Covid-19 pada tahun 2021. Tujuan utama dari kajian ini adalah berupaya menggali peminggiran secara sosial maupun ekonomi oleh sesama rakyat dalam pemanfaatan Kawasan Malioboro sebagai penunjang kehidupan seluruh elemen rakyat. Hal tersebut sekaligus menjadi manfaat utama dari kajian ini yang berupaya memberikan pemahaman pada publik bahwa selama ini ekonomi informal di Malioboro dihadapkan kepada berbagai paradoks konflik horizontal dalam pemenuhan kehidupan, sehingga menjadi sumber utama dari kerentanan kehidupan itu sendiri.

Kerangka Teori

Kedatangan wisatawan dan perkembangan turisme massal sendiri selama ini berkaitan dengan citra keamanan dan kenyamanan destinasi. Kedua hal tersebut menyangkut pada keselamatan dan keengganan wisatawan untuk berkunjung. Ada dua bentuk ancaman yang dapat membawa citra negatif bagi destinasi wisata yang disebabkan faktor manusia dan alam.³ Ancaman dari faktor manusia dapat berbentuk jaminan keselamatan wisatawan kala berada di destinasi, masalah kriminalitas, konflik sosial-politik, terorisme, perang, wabah penyakit, fasilitas sanitasi dan kebersihan, serta ketersediaan sarana dan prasarana. Ancaman dari faktor alam dapat berupa bencana alam

dan kerusakan lingkungan.

Ketidakstabilan politik, terorisme dan indeks persepsi korupsi realitasnya berdampak terhadap perkembangan pariwisata di destinasi wisata yang ditetapkan sebagai warisan UNESCO di 139 negara berdasarkan analisis data panel periode 1999-2009 misalnya menunjukkan dampak yang berbeda-beda. Peningkatan ketidakstabilan politik sebanyak satu unit menurunkan tingkat kunjungan wisatawan sebesar 24%. Tingkat korupsi yang tinggi juga ditemukan memengaruhi penurunan kedatangan wisatawan, namun menjadi tak terlalu berdampak jika negara yang bersangkutan memiliki destinasi wisata berupa warisan sejarah dan alam. Sedangkan peningkatan satu unit kegiatan terorisme menyebabkan penurunan tingkat kunjungan wisatawan sebesar 4-7%.⁴

World Economic Forum pada tahun 2009 sendiri mulai mengeluarkan Indeks Daya Saing Pariwisata yang mencerminkan kinerja ekonomi, aspek keselamatan dan keamanan, kesiapan sumber daya manusia, dan infrastruktur lingkungan dalam menunjang turisme massal. Salah satu aspek penting dari keberadaan indeks tersebut adalah rekomendasi mengenai destinasi, daerah ataupun negara-negara yang berbahaya bagi kunjungan wisatawan.⁵ Keberadaan indeks tersebut mendorong pemerintahan di berbagai negara untuk mendorong kepolisian menjamin aspek keamanan serta meminta perusahaan untuk melatih sumber dayanya dan menyiapkan fasilitas pendukung dan penjamin kenyamanan wisatawan.

Pembatalan kunjungan wisatawan bergantung pada jenis ancaman yang berdampak pada citra negatif negara

3 Dallen J Timothy, "Safety and Security Issues in Tourism," in *Tourism Management Dynamics*, ed. Dimitrios Buhalis and Carlos Costa, 1st ed. (London: Routledge, 2005), 20-23.

4 Ghialy Yap and Shrabani Saha, "Do Political Instability, Terrorism, And Corruption Have Detering Effects On Tourism Development Even In The Presence Of Unesco Heritage? A Cross-Country Panel Estimate," *Tourism Analysis* 18, no. 5 (2013): 593-597.

5 Liliana Popescu, "Safety and Security in Tourism. Case Study: Romania," *Forum Geografic. S.C.G.P.M* 10, no. 2 (2011): 323-326.

penyelenggara turisme massal. Ketersediaan informasi tentang situasi krisis menjadi langkah penting untuk mencegah pembatalan kunjungan wisatawan dalam situasi ancaman terorisme ataupun potensi terjadinya gempa bumi. Sedangkan, jaminan keamanan menjadi langkah penting untuk mencegah pembatalan kunjungan wisatawan di tengah situasi ketidakstabilan politik.⁶ Turis lebih memilih penyediaan informasi terbaru oleh agen perjalanan dibandingkan pemberitaan media massa dalam menentukan apakah akan membatalkan kunjungan wisata atau tidak? Turis juga lebih senang dengan keberadaan petugas keamanan di akomodasi dan destinasi dibandingkan sekadar menyediakan layanan darurat yang bisa dihubungi.

Indonesia sendiri melalui Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Usaha Pariwisata mengatur standar usaha turisme massal yang menjamin keselamatan dan kenyamanan wisatawan, meskipun sertifikasi yang ada bersifat sukarela. Peraturan tersebut adalah turunan dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata yang berupaya melindungi wisatawan dari keselamatan, keamanan, kesehatan dan perlindungan fungsi lingkungan hidup. Peraturan Pemerintah 52 tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata juga telah mengatur Sertifikasi Usaha Pariwisata dan Sertifikat Kompetensi bidang Pariwisata untuk menjamin produk, pelayanan dan pengelolaan usaha turisme. Implementasi penjaminan keamanan dan kenyamanan sendiri kenyataannya kurang maksimal disebabkan keterbatasan anggaran pemerintah untuk membiayai para pengawas yang akan mengecek pelaksanaan jaminan

kualitas usaha turisme.⁷

Sebuah survei terhadap 295 responden wisatawan di Bali dan 242 wisatawan di Yogyakarta menunjukkan bahwa terdapat 118 pilihan kata yang disampaikan responden untuk menunjukkan citra positif turisme di Indonesia. Dua kata yang paling umum adalah “cantik” dan “ramah.” Sedangkan kata-kata yang disampaikan oleh responden yang cenderung netral untuk menggambarkan citra turisme di Indonesia adalah “pantai” dan “panas.” Sedangkan pilihan kata yang digunakan responden untuk menunjukkan citra buruk pariwisata Indonesia adalah “kemacetan,” “korup,” dan “ramai.”

Penyebutan terkait risiko bencana alam justru sama sekali tak muncul dari wisatawan asing untuk menunjukkan citra pariwisata Indonesia. Sebanyak 40% responden menyatakan setuju dan 24% orang menyatakan sangat setuju bahwa Indonesia adalah negara yang aman untuk dikunjungi. Dari aspek pemahaman wisatawan terhadap risiko tinggi bencana alam di Indonesia, hanya dua persen dari wisatawan domestik yang tak setuju dan 11% wisatawan domestik merasa ragu. 52% wisatawan asing menyatakan setuju dengan adanya risiko tinggi bencana alam di Indonesia. Sebanyak 50% dari wisatawan asing menyatakan bahwa terjadinya bencana alam tak akan memengaruhi keputusan mereka untuk tak akan berkunjung ke Indonesia.⁸

Sebuah studi dengan menggunakan data sekunder sepanjang tahun 1998-2016 untuk melihat dampak dari berbagai ancaman terhadap perkembangan turisme di Indonesia menunjukkan bahwa bencana memiliki

⁶ Homa Hajibaba, Yasemin Boztug, and Sara Dolnicar, “Preventing Tourists from Canceling in Times of Crises,” *Annals of Tourism Research* 60 (2016): 56-59.

⁷ Ari Nugraheni, Rahmat Nurcahyo, and Djoko Sihono Gabriel, “Certification of Tourism Business Standards and CHSE Standards in Indonesia,” in *Proceedings of the International Conference on Industrial Engineering and Operations Management Istanbul, Turkey, March 7-10, 2022* (Istanbul, 2022), 243-247.

⁸ Erda Rindrasih, “Tourists’ Perceived Risk and Image of Destinations Prone to Natural Disasters: The Case of Bali and Yogyakarta, Indonesia,” *Humaniora* 30, no. 2 (2018): 194-200.

dampak yang berbeda terhadap pariwisata dalam hal skala kerusakan, lokasi bencana dan jenis bencana. Serangan teroris di Bali tahun 2002 menurut kajian tersebut yang paling berdampak terhadap turisme dari aspek jumlah kunjungan turis asing, pendapatan negara dari sektor pariwisata maupun tingkat hunian hotel. Ancaman yang ada di suatu wilayah destinasi wisata sendiri mendorong wisatawan memilih berkunjung ke tempat lain yang dirasa lebih aman. Misalnya saat terjadi Bom Bali pada tahun 2002, tingkat hunian kamar di Bali turun sebesar 10,7%, sedangkan tingkat hunian kamar di Yogyakarta meningkat 1,5% dan Aceh meningkat 38,42%. Tingkat kunjungan wisatawan di Bali turun 5% pasca Bom Bali Tahun 2002, sedangkan jumlah kunjungan ke Yogyakarta meningkat 5%.⁹

Di sisi lain pengembangan turisme massal secara masif dapat menciptakan kerentanan dari sektor pariwisata sendiri. Misalnya terkait kejadian Bom Bali Tahun 2002 dan 2005, di mana perkembangan turisme massal yang masif di Bali dan terbukanya “demokrasi” pasca Orde Baru (Orba) justru dianggap sebagai ancaman eksistensi nilai-nilai Islam oleh kelompok seperti Jemaah Islamiyah (JI).¹⁰ Akibatnya lokasi turisme massal sangat rentan menjadi sasaran empuk dari terorisme, terlepas dari permasalahan dari segi ideologi kelompok JI yang “tak manusiawi” dan ingin memaksakan nilai-nilainya.

Pemberitaan media massa yang masif terhadap Bom Bali justru sesuai dengan kepentingan kelompok JI yang ingin mematenkan ekonomi turisme massal. Keberadaan orang-orang Barat yang menjadi

turis di Bali juga menjadi sasaran empuk dari kelompok JI yang menganggap bahwa Barat berada dalam “kesesatan” dan tak “beradab sesuai dengan nilai Islam.” Ketidaksiapan infrastruktur kontraterorisme serta kapasitas sektor pertahanan dan keamanan Indonesia sendiri sebelum Bom Bali I juga menjadi biang keladi dari tak mampu dicegahnya adanya tindakan terorisme tersebut.¹¹

Upaya menjaga citra destinasi wisata yang ketat dalam turisme massal dalam menangani terorisme maupun ketidakstabilan politik di sisi lain dapat berdampak negatif terhadap kehidupan sosial seperti pengekangan aspirasi warga negara dan menguatnya otoritarianisme rezim. Dalih menjaga iklim pariwisata misalnya pernah digunakan Presiden Marcos di Filipina untuk memukul kemungkinan munculnya oposisi politik. Pariwisata justru menjadi alat Marcos untuk menunjukkan keadaan negaranya yang damai dan aman, meskipun berada dalam kondisi darurat militer.¹²

Berbeda dengan kajian sebelumnya yang melihat kaitan ekonomi turisme bersama kerentanannya dengan usaha kecil, studi ini dibingkai dengan pandangan Jan Breman yang melihat ekonomi informal sebagai rezim eksploitasi dan eksklusi. Ekonomi informal yang melekat pada turisme di Malioboro akan dipahami memiliki sikap menekan sesamanya sendiri dan buruhnya, tetapi kajian ini akan menambah kebaruan dengan munculnya aliansi di antara usaha kecil yang saling berkomplot dan meminggirkan. Cara pandang mengeksploitasi dan mengekklusi/meminggirkan tersebut menjadi menarik untuk menunjukkan bahwa ekonomi informal itu sendiri sejak awal adalah bagian dari dan menciptakan kerentanan-kerentanan penghidupan lainnya.¹³ Hal tersebut sesuai

9 Erda Rindrasih et al., “Tourism and Disasters: Impact of Disaster Events on Tourism Development in Indonesia 1998-2016 and Structural Approach Policy Responses,” *Journal of Service Science and Management* 12 (2019): 98-105.

10 Richard J. Chasdi, “Prevention of Major Economic Disruptions Following Acts of Terrorism – The Case of the 2002 and 2005 Bali Bombings,” in *Handbook of Terrorism Prevention and Preparedness*, ed. Alex P. Schmid (The Hague: ICCT Press, 2020), 990-994.

11 Chasdi, 996-1000.

12 Sevil F. Sönmez, “Tourism, Terrorism and Political Instability,” *Annals of Tourism Research* 25, no. 2 (1998): 431-436.

13 Jan Breman, “An Informalised Labour System End of Labour Market Dualism,” *Economic and Political Weekly*

dengan pandangan Breman yang melihat bahwa di dalam ekonomi informal, rakyat kecil saling berkonflik satu sama lain untuk bertahan hidup.

Metode Penelitian

Kajian ini adalah penelitian kualitatif memakai pendekatan studi kasus untuk membatasi lokus penelitian pada kerentanan ekonomi informal sektor turisme massal di Kawasan Malioboro dan sekitarnya. Peneliti melakukan pengkajian secara *purposive sampling* yakni sumber data dan informan penelitian telah ditentukan secara spesifik serta dipilah untuk mampu menjawab pertanyaan penelitian. Triangulasi metode dan sumber data dilakukan untuk menjamin validitas dan kredibilitas atas realitas yang dikaji, sehingga dicapai kebenaran ilmiah yang bersifat intersubjektif.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan Ketua PKL Malioboro, Ketua Paguyuban Pedagang Lesehan Malioboro, dan Anggota Paguyuban Pedagang Pelataran Beringharjo pada Maret 2021 serta melalui penelusuran dokumen pemerintahan, laporan penelitian, kajian lembaga swadaya masyarakat (LSM), artikel jurnal dan pemberitaan media daring atas masalah yang dikaji. Wawancara dilakukan secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting disebabkan adanya situasi pandemi Covid-19. Hasil wawancara disusun menjadi transkrip yang kemudian dikoding serta dielaborasi untuk mendapatkan benang merah, sedangkan penelusuran dokumen ditindaklanjuti dengan pemilahan informasi yang sesuai untuk menjawab pertanyaan penelitian. Analisis data dilakukan sejak proses perencanaan, pengumpulan, verifikasi data, dan penarikan kesimpulan. Analisis data dilakukan sejak perencanaan penelitian, penyusunan kajian literatur, memetakan informasi kunci,

mengorganisir temuan sampai dengan verifikasi serta penarikan kesimpulan.

Dari Jalan Seremonial Menjadi Ruang Komoditas (Tahun 1750-an sampai 1970)

Nama Malioboro berasal dari istilah dalam bahasa Sansekerta yakni *mâlya* yang artinya karangan bunga ataupun untaian bunga juga *mâlyakarma* (artinya mendapatkan untaian bunga) dan *mâlyabhârin* (maknya berhiaskan atau mengenakan untaian bunga) dapat dilacak dalam Ramayana berbahasa Jawa Kuno yang ditulis pada pertengahan abad ke-9 juga Adiparwa dan Wirathaparwa yang dibuat pada abad 10. Hal tersebut diduga berkaitan dengan penamaan Ngayogyakarta yang kemungkinan berasal dari kata *Ayodhya*, ibu kota kerajaan Raja Rama dalam cerita Ramayana. Carey memandang bahwa penamaan tersebut memungkinkan Jalan Malioboro sejak awal berdirinya Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat pada tahun 1750-an pasca perjanjian Giyanti sudah difungsikan sebagai jalan seremonial bagi aktivitas upacara kerajaan persis seperti yang digunakan dalam keyakinan Hindu mengenai tata ruang ibu kota kerajaan di India.¹⁴

Fungsi seremonial terus berlangsung dengan bercokolnya kekuasaan Hindia Belanda di Yogyakarta, misalnya ditandai dengan pendirian tugu kemenangan penjajah yang ditandai dengan kehadiran dua barisan prajurit Jawa membawa tombak berbaris di sepanjang Jalan Malioboro dan diiringi gamelan saat Raffles datang pada 8 Desember 1813. Prosesi tersebut menjadi bentuk penghormatan penguasa lokal kepada pemerintahan kolonial. Sebaliknya bagi orang Jawa, prosesi penyambutan menjadikan pemerintah kolonial dianggap sebagai “kakek” dengan dipandang sebagai pewaris sah

14 Peter Carey, “Jalan Malioboro (‘Jalan Berhiaskan Untaian Bunga’),” in *Asal Usul Nama Yogyakarta–Malioboro*, ed. Peter Carey (Depok: Komunitas Bambu, 2015), 7–41.

kerajaan Pajajaran dan dilihat setara dengan penguasa di Jawa Tengah bagian selatan.

Penguasa kolonial tak dipandang memegang kekuasaan di Yogyakarta bagi orang Jawa. Kala pemerintahan kolonial berhubungan dengan Raja Jawa, mereka dipandang memiliki status yang setara melalui pengiriman duta kepada penguasa setempat. Sampai awal abad ke-19 pandangan tersebut tetap bertahan dan berubah sejak masa Gubernur Jenderal Daendels pada Juli 1809 mulai mengunjungi keraton Yogyakarta baru memunculkan masalah mengenai prosesi penyambutan perwakilan pemerintah kolonial. Prosesi seremonial di Malioboro menurut Carey bagi orang Jawa memiliki dua tujuan yakni penghormatan kepada tamu sekaligus penjinakkan kekuasaan yang lebih besar untuk mau mengikuti keseluruhan upacara penyambutan dari tugu sampai dengan depan keraton.¹⁵

Kawasan Malioboro ditata sesuai dengan konsep *catur gatra tunggal* atau *catur sagotra*, di mana terdapat empat elemen penting dalam tata ruang yakni politik (Kraton dan Kepatihan), keagamaan (Masjid Gedhe), ekonomi (Pasar Gedhe), dan sosial (Alun-alun). Kepatihan menjadi kantor dan kediaman *pepatih dalem* yang diangkat oleh penguasa lokal atas persetujuan pemerintah kolonial dalam menjalankan pemerintahan sehari-hari. Pasar Gedhe yang terletak di 450 meter arah selatan Kepatihan awalnya adalah tanah lapang yang mulai digunakan Hamengkubuwono (HB) I pada tahun 1758 dalam seremoni pertemuan dengan rakyat dan selanjutnya digunakan rakyat berjualan menggunakan lapak sementara. Sampai dengan tahun 1830, lapak-lapak berbentuk limasan berdinding kayu jati mulai banyak bermunculan.¹⁶ HB VIII kemudian

memerintahkan pembangunan pasar menjadi berdinding beton dan mendapat julukan "*Een der Mooiste Passers op Java*" (Pasar Terindah di Jawa). Saat HB IX naik tahta, pasar tersebut berubah nama menjadi Pasar Beringharjo yang menandai tumbuhnya aktivitas ekonomi di sekitar Malioboro.

Pengesahan *Decentralisatie Wet* tahun 1903 menjadi titik berikutnya dalam perencanaan tata ruang Yogyakarta termasuk di dalamnya Malioboro. Sejumlah fasilitas penunjang perekonomian didirikan pada rentang waktu 1870-1920-an seperti Stasiun Tugu (1887) yang jalur rel kereta apinya membentang pada sisi barat ke timur melintasi Kawasan Malioboro, berbagai fasilitas perbankan, kantor pos dan gedung perkantoran lainnya.¹⁷

Berkembangnya teknologi penerangan lampu gas pada tahun 1890 dan pergantian ke penggunaan dengan penggunaan saluran listrik pada 1917-1921 mengubah karakter jalan Malioboro dan mempercepat komodifikasi ruang. Penampilan jalan yang sebelumnya lebar dan ditanami pohon-pohon dengan perkampungan yang tertata rapi berubah menjadi pertokoan yang dikelola oleh orang Jawa maupun penduduk etnis Tionghoa.¹⁸ Pasar Gedhe semakin ramai dan menarik minat penduduk etnis Tionghoa bersama kalangan rakyat lainnya untuk berjualan di sekitar Malioboro. Warung-warung yang dikelola warga etnis Tionghoa tumbuh sepanjang wilayah Kranggan sampai dengan wilayah selatan rel kereta atas izin penguasa lokal.¹⁹

Munculnya *Archaeologische Vereeniging van Jogjakarta* pada tahun 1885 yang berperan dalam pelestarian situs purbakala di sekitar Yogyakarta sampai tahun 1902 menunjang tumbuhnya sektor turisme telah membuat Yogyakarta semakin ramai. Kekayaan seni dan

15 Carey.

16 Siti Mahmudah Nur Fauziah, "Dari Jalan Kerajaan Menjadi Jalan Pertokoan Kolonial: Malioboro 1756-1941," *Lembaran Sejarah* 14, no. 2 (2018): 175-183.

17 Fauziah.

18 Carey, "Jalan Malioboro (Jalan Berhiaskan Untaian Bunga)."

19 Fauziah, "Dari Jalan Kerajaan Menjadi Jalan Pertokoan Kolonial: Malioboro 1756-1941."

budaya serta kemudahan bidang transportasi mengingat saat itu Yogyakarta menjadi “kota transit” antara Jawa Barat dan Jawa Timur memicu munculnya organisasi pariwisata nasional bernama Vereeniging Touristen Verkeer (VTV) yang membuka cabang di Malioboro No. 8B dan di Toegoeweg No. 6. Berbagai organisasi yang mempromosikan dan menyediakan layanan turisme di Yogyakarta terus bermunculan sejak tahun 1937 dan Malioboro semakin ramai dikunjungi turis serta memicu peningkatan kebutuhan hunian bagi penduduk maupun wisatawan.²⁰

Tumbuhnya ekonomi informal di Malioboro sejak abad ke-19 dapat dikatakan sebagai bagian dari mekanisme neoliberal dalam memanfaatkan ruang kota. Kerangka neoliberal telah mendorong munculnya imajinasi “kota wirausaha,” di mana setiap rakyat harus membuka usaha untuk menopang penghidupannya sendiri. Tanpa disadari ternyata pemerintah Hindia Belanda telah memulai proses tersebut bahkan sebelum proyek neoliberal itu sendiri digalakkan secara global pada tahun 1970-an.²¹

Malioboro menikmati geliat ekonominya pada tahun 1920-an sampai 1930 sampai akhirnya terdampak krisis ekonomi global pada tahun 1930. Krisis tersebut sempat memicu fluktuasi harga produk di Malioboro dan memaksa beberapa usaha mengakhiri bisnisnya.²² Jalan Malioboro terus memiliki fungsi seremonial bagi kerajaan sampai abad ke-20 seperti saat pawai keliling membawa kedua panji pusaka keraton yakni Kyai Tunggul Wulung dan Kyai Pare Anom saat terjadinya pandemi flu Spanyol pada Oktober-November 1918 dan penyakit pes pada Desember 1932.

20 Fauziah.

21 M. Victoria Quiroz-Becerra, “Street Vendors Claiming Respect and Dignity in the Neoliberal City,” in *Immigrant Women Workers in the Neoliberal Age*, ed. Nilda Flores-González et al. (Illinois: Board of Trustees of the University of Illinois, 2013), 19–38.

22 Fauziah, “Dari Jalan Kerajaan Menjadi Jalan Pertokoan Kolonial: Malioboro 1756-1941.”

Saat masa HB VII, jalan Malioboro juga digunakan untuk prosesi para penari dan grup musik Beksan Trunojoyo dalam seremoni pernikahan di keraton.²³

Pemerintah kolonial Hindia Belanda meninggalkan Yogyakarta pada 18 Maret 1942 seiring peralihan kekuasaan ke tangan pemerintah militer Jepang.²⁴ Pemerintahan militer Jepang mendorong mobilisasi rakyat untuk kepentingan perang yang akan berdampak pada kemampuan massa dalam menghadapi situasi sulit di menjelang kemerdekaan Indonesia. Berita tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia tersebar luas setelah Ki Hajar Dewantara bersama murid-muridnya bersepeda berkeliling kota Yogyakarta pada sore hari tanggal 17 Agustus 1945.²⁵ Presiden Soekarno pada 18 Agustus 1945 menyatakan pengakuan kedaulatan kepada keempat kerajaan di wilayah Jawa untuk menjadi bagian dari republik dan mengirimkan surat kepada keempat penguasa Jawa.

Sultan HB X kemudian membalas surat Soekarno melalui telegram pada 20 Agustus 1945 dan menyatakan bahwa Kasultanan Yogyakarta bersedia menjadi bagian dari Indonesia sekaligus memberikan kesetiaan pada republik.²⁶ Sultan HB X bersama dengan Pakualam VIII bersama elit lainnya di Yogyakarta menyatakan diri secara resmi menjadi bagian dari Republik Indonesia dan menegaskan bahwa seluruh aparat

23 Carey, “Jalan Malioboro (‘Jalan Berhiaskan Untaian Bunga’).”

24 Uji Nugroho Winardi, “Rakyat Bergerak, Djogja Bergelora: Mobilisasi Tenaga Perang Masa Revolusi,” in *Gelora Di Tanah Raja: Yogyakarta Pada Masa Revolusi 1945-1949*, ed. Sri Margana et al. (Yogyakarta: Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta bekerjasama dengan Departemen Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada, 2017), 79.

25 Winardi, 83.

26 Farabi Fakhri, “Keraton Dan Rakyat: Kerjasama Menuju Kemerdekaan Indonesia,” in *Gelora Di Tanah Raja: Yogyakarta Pada Masa Revolusi 1945-1949*, ed. Sri Margana et al. (Yogyakarta: Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta bekerjasama dengan Departemen Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada, 2017), 3.

pemerintahan Yogyakarta diisi oleh orang Indonesia.²⁷

Tanggal 21 September 1945, setelah gagal rapat raksasa di Lapangan Ikada pada 19 September 1945, rakyat Yogyakarta yang tergabung dalam berbagai laskar rakyat membalas dengan tindakan penurunan bendera Jepang (*Hinomaru*) dan menggantinya dengan bendera Merah Putih di Gedung Agung. Massa kemudian melakukan pawai di sepanjang Jalan Malioboro setelah penggantian bendera dikawal oleh Polisi Istimewa. Nyaris terjadi bentrokan antara Polisi Istimewa dengan pasukan Jepang, namun berakhir dengan damai.²⁸

Tanggal 4 Januari 1946, terjadi perpindahan ibu kota Indonesia dari Jakarta ke Yogyakarta seiring meluasnya serangan militer Belanda dan sebelumnya HB IX telah menawarkan wilayahnya menjadi pusat pemerintahan republik.²⁹ Yogyakarta menjadi pusat perjuangan kemerdekaan dan wilayahnya dipenuhi oleh spanduk propaganda dalam bahasa Inggris, agar dapat dibaca oleh konsulkonsul asing yang datang. Pawai dan aksi massa seringkali diadakan di Jalan Malioboro untuk merayakan kemerdekaan Indonesia. Perpindahan ibu kota ke Yogyakarta telah membawa perubahan berupa datangnya pengungsi baik dari kalangan pemerintahan maupun pejuang Divisi Siliwangi bersama laskar rakyat lainnya memunculkan masalah perumahan dan transportasi.³⁰

Para pengungsi mencoba bertahan hidup di Yogyakarta dengan membuka warung makanan ataupun menjadi pelayan di rumah makan atau toko juga berjualan di sepanjang Jalan Malioboro. Tidak sedikit para wanita sembari berjualan mengumpulkan informasi disebabkan banyak juga serdadu Belanda yang makan di warungnya. Banyak dari mereka

yang terpaksa menjadi pengemis, pelacur, pencopet sampai gelandangan termasuk di sekitar Jalan Malioboro. Awal tahun 1946, para gelandangan tersebut bergabung di Taman Pengharapan Barisan P sebagai rumah singgah mereka.³¹

Tiga puluh perempuan berseragam hijau berkerumun di Stasiun Tugu pada 22 Juni 1946 menunggu keberangkatan yang dipimpin Rahayoe Tabrani, mereka adalah perempuan Laskar Wanita Indonesia (LASWI) yang ditugaskan untuk membuat dapur umum penopang gerilya di Jawa Barat. Mereka sebelumnya telah mendapatkan pelatihan militer, pengobatan, baris-berbaris, sejarah dan caraka selama tiga bulan.³² Peristiwa Agresi Militer Belanda II mendorong Jenderal Sudirman menerapkan taktik perang semesta dan mendorong semua kalangan masyarakat yang mampu untuk terlibat.

Muncul peran baru yang dijalankan kalangan perempuan menjadi *pon* yakni tugas khusus dalam mengatur lalu lintas barang, memastikan logistik dapur umum dan mendistribusikan konsumsi bagi prajurit. Keberadaan *pon* sebenarnya cukup menyulitkan para pedagang termasuk yang berada di Kawasan Malioboro disebabkan mereka harus menyisihkan barang dagangan untuk kebutuhan perang dan tak jarang seluruh barang mereka dapat dirampas bilamana tak memberi logistik.³³

Meledaknya Agresi Militer Belanda II memicu eksodus warga Kota Yogyakarta ke kabupaten di sekitarnya dan mendorong perampokan rumah-rumah yang kosong oleh segerombolan bandit. Usaha memperbaiki infrastruktur sulit dilakukan pasca Agresi

27 Fakih, 34.

28 Winardi, 94.

29 Fakih, 37.

30 Fakih, 39.

31 Galuh Ambar Sasi, "Di Tanah Kiblik: Perempuan Yogyakarta Dalam Gemerlap Revolusi," in *Gelora di Tanah Raja: Yogyakarta Pada Masa Revolusi 1945-1949*, ed. Sri Margana et al. (Yogyakarta: Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta bekerjasama dengan Departemen Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada, 2017), 195.

32 Sasi, 180.

33 Sasi, 183.

Militer II disebabkan adanya kekurangan mesin gilas yang oleh pemerintah militer Jepang telah dibawa ke negaranya. Jalan-jalan utama termasuk Malioboro ikut mengalami kerusakan akibat Agresi Militer II. Apalagi siasat bumi hangus yang diambil oleh Tentara Nasional Indonesia dalam menghadapi serangan Belanda memang berupaya membatasi akses pergerakan musuh.³⁴

Kehancuran ekonomi tahun 1950-an pasca perang kemerdekaan memicu munculnya “pengangguran revolusi” yang berjumlah kurang lebih empat ribu mantan pejuang laskar rakyat. Naiknya harga kebutuhan pokok dan bangkrutnya industri seperti rokok, batik dan perak di Yogyakarta memicu mantan pejuang yang tergabung dalam serikat buruh untuk meningkatkan daya tawar di hadapan pengusaha. Sentral Buruh Tekstiel Yogyakarta mengadakan sidang pleno pada tahun 1952 untuk membahas jumlah pengangguran dan penutupan usaha tekstil.³⁵ Kondisi kehidupan petani di Yogyakarta yang memprihatinkan juga memicu Sultan HB IX untuk mencari kredit usaha dari Food and Agriculture Organization (FAO) dan pemerintah Jerman Timur untuk mengoperasikan kembali pabrik-pabrik gula. Pabrik Gula Madukismo kemudian dibuka. Kasultanan dan Pakualaman menjadi “kapitalis utama” di daerah ini, tetapi produktivitas pabrik yang ada tak seperti di era kolonial menyebabkan Yogyakarta semata bergantung pada pertanian dan ekonomi informal.³⁶

Tanggal 8 Desember 1955, diadakan rapat antara pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) bersama para residen seluruh Jawa Tengah dan berhasil membentuk Badan Tourisme Jawa Tengah (Batour). Batour dibentuk untuk mengembangkan pariwisata

di DIY dan Jawa Tengah melalui kerjasama dengan pemerintah daerah. Musyawarah Nasional Turisme I berlangsung di Bogor pada tahun 1957 dan mendorong pembentukan Dewan Turisme Indonesia (DTI) menyebabkan semua organisasi yang berada di daerah terkait turisme menjadi cabang dari DTI.³⁷ Agustus 1957 dilakukan pembentukan Batour cabang Yogyakarta terkait rencana subsidi dari Kementerian Perhubungan kepada DTI dalam pengembangan turisme di Yogyakarta. Batour kemudian mulai mengembangkan turisme di Yogyakarta dengan fasilitas akomodasi yang terbatas hanya 2 hotel dan 47 losmen.

Kawasan Malioboro kemudian menjadi salah satu lokasi penting bagi kunjungan turis, meskipun Yogyakarta menghadapi keterbatasan penyediaan akomodasi dan transportasi baru terutama disebabkan minimnya anggaran. Puncak kunjungan di Kawasan Malioboro terjadi pada bulan September-Oktober pada tahun 1956, karena bersamaan dengan acara Sekaten dan peringatan ulang tahun Kota Yogyakarta ke-200. Penurunan wisatawan terjadi pada tahun 1957 disebabkan ternyata ekonomi turisme di Kawasan Malioboro tergantung pada penyelenggaraan seremoni. Mirisnya seremoni untuk atraksi wisata di Kawasan Malioboro diadakan kala kota sendiri sedang dilanda wabah penyakit busung lapar dan kelaparan akibat naiknya harga kebutuhan pokok pada tahun ‘50-an. Ledakan pengungsi yang terjadi pada masa revolusi dan ditambah dengan terjadinya deindustrialisasi memicu pula migrasi dari desa ke kota, namun serapan tenaga kerja dari turisme yang minim menyebabkan semakin meningkatnya inflasi dan tumbuh suburnya ekonomi informal.³⁸

Sejak tahun 1960-an, ekonomi wilayah Pecinan di Malioboro melemah akibat

34 Fakih, 41.

35 Uji Nugroho Winardi et al., *Jogja Memilih: Sejarah Pemilu 1951 Dan 1955 di Yogyakarta*, ed. Galih Adi Utama (Yogyakarta: Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta, 2018), 69-74.

36 Winardi et al.

37 Hasbi Marwahid, “Membangun Kembali Pariwisata Yogyakarta: Strategi dan Upaya Pemerintah Melalui Badan Tourisme (BATOUR) 1954-1959,” *Jurnal Penelitian Sejarah dan Budaya* 8, no. 1 (2022): 105-34.

38 Marwahid.

situasi politik secara nasional.³⁹ Melemahnya ekonomi Pecinan terutama disebabkan sentimen “Anti Cina” di seluruh negeri yang disebabkan oleh fitnah keterlibatan negara Tiongkok dalam G.30S/PKI.⁴⁰ Turisme di Yogyakarta sampai dengan awal tahun 1970-an kurang berkembang disebabkan kurangnya promosi, minimnya akomodasi dengan pelayanan memadai dan belum baiknya sarana transportasi. Sampai dengan tahun 1967 tercatat hanya terdapat 46.600 wisatawan asing dan domestik yang menginap di hotel yang tersebar di Yogyakarta.⁴¹ Pemerintah daerah berupaya untuk menyediakan lebih banyak kios untuk berdagang dimulai pada tahun 1960-an pada sisi selatan Jalan Perwakilan dan diikuti sisi berlawanan pada tahun 1970-an.⁴²

Fenomena tumbuhnya ekonomi informal di Malioboro sekali lagi menunjukkan bahwa informalitas dapat terjadi sebagai konsekuensi dari proses formalisasi ruang perkotaan yang diikuti oleh komodifikasi memunculkan berbagai eksternalitas berupa pertumbuhan sumber-sumber kehidupan yang “tak tertata. Hal tersebut dalam konteks Malioboro terutama disebabkan oleh tak berkembangnya lapangan kerja formal sebagai akibat dari situasi krisis 1930, melemahnya industri gula dan situasi perang kemerdekaan. Artinya sengkabut ekonomi informal perkotaan tak dapat dilepaskan dari realita kemiskinan antara desa dan kota, apalagi saat perang kemerdekaan Yogyakarta dibanjiri pengungsi. Ekonomi informal akibatnya bukannya menjadi “momentum transisi” bagi rakyat miskin untuk bisa masuk ke lapangan kerja formal yang lebih sejahtera, melainkan justru menjadi satu-satunya sumber kehidupan

yang tersedia di Malioboro dan sekitarnya.⁴³ Ekonomi informal Malioboro bahkan telah mengkomodifikasi fungsi seremonial dari ruang kota di sekitarnya untuk menjadi bagian penting dari keberlangsungan informalitas itu sendiri terutama berkaitan dengan tumbuhnya turisme.

Ruang Komoditas dengan Geliat Turisme Massal (1970-2016)

Pemerintah Kota Yogyakarta pada tahun 1970-an dengan menggunakan dana pemerintah pusat melakukan proyek peremajaan perkotaan, di mana Kawasan Malioboro menjadi salah satu lokasi vital yang ditata.⁴⁴ Perkembangan turisme massal yang semakin masif di tahun ‘70-an juga ditandai dengan munculnya hotel baru di sekitar stasiun Tugu dan Malioboro.⁴⁵ Tahun ‘70an menjadi pertanda pula bagi tumbuhnya ekonomi turisme dengan tumbuhnya komunitas seni jalanan dan diskusi yang digerakkan oleh kalangan mahasiswa.⁴⁶

Sultan HB IX pada tahun 1980-an memberikan ruang ekonomi bagi Pedagang Kaki Lima (PKL) dan memberikan ruang trotoar pada kegiatan usaha mereka. Pemberian ruang ekonomi sebenarnya telah memunculkan kecemburuan bagi kelompok etnis lainnya seperti orang Madura yang juga

39 Sunyoto Usman et al., *Malioboro*, ed. Sunyoto Usman (Yogyakarta: PT. Mitra Tata Persada dan Bappeda Kota Yogyakarta, 2006).

40 Bambang Hari Wibisono, *Transformation of Jalan Malioboro, Yogyakarta: The Morphology and Dynamics of a Javanese Street* (The University of Melbourne, 2001), 93.

41 Timothy and Wall, 325.

42 Wibisono, 174.

43 Jan Breman, “Informality: The Bane of the Labouring Poor under Globalised Capitalism,” in *The Informal Economy Revisited Examining the Past, Envisioning the Future*, ed. Martha Chen and Françoise Carré (New York: Routledge, 2020), 31–38.

44 Rony Gunawan Sunaryo et al., “The Transformation Of Urban Public Space In Yogyakarta A Search For Specific Identity & Character,” in *Insular Diversity : Architecture – Culture – Identity in Indonesia*, ed. Erich Lehner, Irene Doubrawa, and Ikaputra (Vienna: IVA-ICRA, Institute for Comparative Research in Architecture, Vienna, Austria and Department of Architecture and Planning, Gadjah Mada University Yogyakarta, Indonesia, 2013), 290.

45 Ofita Purwani, *Javanese Power; Silent Ideology And Built Environment Of Yogyakarta and Surakarta* (The University of Edinburgh, 2014), 101-102.

46 Pinurba Parama Pratiyudha, “Participation Of Malioboro’s Parking Attendants Relocation In Right To The City Perspective,” *Jurnal Pengembangan Kota* 8, no. 1 (2020): 38.

memiliki usaha kecil. Kenyataannya kelompok PKL yang ada justru menjual kembali ruang-ruang ekonomi yang diberikan kepada pengusaha lainnya dan memicu sengketa. Sebelumnya pada pertengahan tahun 1970-an juga sempat terjadi perkelahian antara pengemudi becak yang menyebabkan kematian sejumlah pengemudi beretnis Batak.⁴⁷ Acara besar kembali diselenggarakan di Kawasan Malioboro pada 7 Maret 1989 yakni penobatan Raja HB X setelah berpulanginya HB IX pada 3 Oktober 1988.⁴⁸

Munculnya usaha kecil di Jalan Ahmad Yani pada tahun 70-an menjadi penanda penting lainnya geliat ekonomi informal yang ditopang turisme di Kawasan Malioboro. PKL di Jalan Ahmad Yani kemudian menjadi kelompok organisasi usaha kecil pertama di Malioboro yang dibentuk pada tahun 1982 dengan nama Paguyuban Tri Dharma. Pengaruh ekonomi politik yang semakin meluas dari Tri Dharma mendorong pengakuan secara formal oleh pemerintah kota pada tahun 1987.⁴⁹ Kelompok lainnya muncul bernama Paguyuban PKL Malioboro-Ahmad Yani (Pamalni) dan diakui oleh pemerintah kota pada tahun 1996.

Kelompok usaha lainnya adalah Koperasi PPKL-YI merupakan organisasi PKL terbesar di Kota Yogyakarta yang juga beroperasi di Jalan Solo, Jalan Jenderal Sudirman, dan Jalan Diponegoro; tetapi hanya memiliki sedikit anggota di Malioboro. Mereka menempati sisi barat dan sebagian sisi selatan Pasar Beringharjo dan sisi barat Pasar Sore Malioboro.⁵⁰ Kelompok lainnya yakni Paguyuban Handayani yang berdiri pada tahun 1990 mewadahi para pedagang bakso, es campur, mie ayam dan dawet di depan Hotel

Garuda, Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Kepatihan dan di Jalan Perwakilan. Paguyuban Pedagang Lesehan Malioboro (PPLM) juga terbentuk pada tahun 1990-an untuk mengorganisasikan para pelaku usaha lesehan.⁵¹

Pemerintah daerah (Pemda) kemudian melakukan beberapa pengaturan seperti membatasi jenis barang dagangan dan membatasi luas area berjualan maksimal berukuran 1,5 x 1,5 m² serta tinggi maksimal lapak sejauh 1,25 meter. Pemerintah awalnya hanya menyediakan 550 kapling tempat berjualan, tetapi meluas menjadi 575 akibat terjadi penambahan pelaku usaha. Tri Dharma kemudian muncul menjadi koperasi yang membawahi usaha kecil di depan toko yang menghadap sisi barat, sedangkan Pamalni mengorganisasi PKL yang berada di depan toko yang menghadap arah timur. Pelaku usaha kecil tersebut pada awalnya berasal dari kalangan muda putus sekolah maupun seniman jalanan. Akibat jumlah pelaku usaha yang bertambah, akhirnya terjadi pengaturan luas lapak maksimal 0,6 x 0,8 m² dan tidak diperkenankan menutupi etalase toko.⁵²

Awalnya keberadaan Tri Dharma dan Pamalni memiliki interaksi kurang baik dengan pemilik toko yang tergabung dalam Paguyuban Pedagang Malioboro (PPM), tetapi berkat komunikasi terus menerus akhirnya tercapai koordinasi yang baik. Paguyuban lainnya seperti PPLM dan Paguyuban Handayani juga berupaya membangun kesepakatan terkait penggunaan ruang ekonomi berdasarkan waktu berjualan. Sisi Timur Malioboro misalnya dari pagi sampai sore digunakan oleh pedagang bakso, sedangkan saat menjelang malam hari harus bergantian dengan usaha lesehan.⁵³

47 Max M. Richter, *Musical Worlds in Yogyakarta* (Leiden: KITLV Press, 2012), 8-9.

48 Purwani, 134-135.

49 Fadlurrahman et al., "Mempertanyakan Pengelolaan Publicness Pada Kawasan Malioboro-Ahmad Yani Ditengah Dominasi Perekonomian," *Spirit Publik* 13, no. 2 (2018): 72-83.

50 Usman et al., *Malioboro*, 73.

51 Usman et al, 75-76.

52 Edi Purwanto et al., "Mengelola Konflik Pemanfaatan Ruang Berbasis Nilai Lokal Ruang Kota Koridor Jalan Malioboro - Kota Jogjakarta," *Tata Loka* 14, no. 3 (2012): 176-177.

53 Purwanto et al.

Malioboro Mall muncul sebagai satu-satunya pusat perbelanjaan modern di Kawasan Malioboro sejak tahun '90-an. Keberadaan mall telah merubah imajinasi tentang ruang publik yang harus dijaga kebersihannya tak hanya untuk berbelanja, namun juga rekreasi dan menjadi alternatif pasar musiman seperti Pasar Malam Sekaten.⁵⁴ Munculnya Malioboro Mall menjadi bagian dari perkembangan deretan pertokoan, bisnis cendera mata dan perhotelan di sekitar Malioboro sejak tahun 1980-an.

Malioboro Mall dibangun atas kerjasama Pemerintah DIY bersama dengan PT Yogya Indah Sejahtera (YIS) dan menjadi salah satu pesaing usaha kecil di Malioboro.⁵⁵ Ramayana kemudian muncul sebagai pusat perbelanjaan lainnya menyusul Malioboro Mall. Keberadaan Malioboro Mall memicu komersialisasi wilayah di sekitarnya dan menumbuhkan bisnis papan reklame. Bangunan komersial di sekitarnya kemudian mengikuti memasang berbagai papan reklame sebagai strategi untuk mempertahankan bisnisnya bersaing dengan Malioboro Mall.⁵⁶

Seiring dengan krisis ekonomi yang memicu desakan mundurnya Presiden Soeharto pada 20 Mei 1998, Sultan HB X menyatakan mendukung aksi massa yang mendukung mundurnya sang presiden. Aksi massa dilakukan mulai dari Boulevard Universitas Gadjah Mada melalui Jalan Malioboro menuju Alun-Alun Utara, saat itu usaha-usaha kecil tak buka dan beberapa orang menyediakan makanan dan minuman gratis bagi peserta demonstrasi. Acara seremonial kembali digelar melewati Malioboro saat pernikahan GKR Pembayun pada 28 Mei

2002.⁵⁷ Pasca tahun 1998 juga terbentuk Paguyuban Angkringan yang awalnya terdiri atas dua organisasi. Pemerintah Kota Yogyakarta kemudian merelokasi pelaku usaha angkringan dan menggabungkannya menjadi satu wadah organisasi pada Maret 2004.⁵⁸

Setelah krisis ekonomi 1998, jumlah pedagang kaki lima meningkat drastis sebagai konsekuensi tak adanya penopang sumber penghidupan lainnya. Pemerintah kota mulai berupaya meyakinkan pelaku usaha kecil di sekitar wilayah Tugu sampai rel kereta untuk direlokasi ke pasar pada tahun 2007.⁵⁹ Relokasi muncul dengan dua alasan yakni tersedianya fasilitas pasar dan anggapan bahwa usaha kecil di trotoar menjadi sumber kemacetan dan kekacauan di kota. Pemerintah kota mulai rajin mendata usaha kecil dan mendorong mereka untuk berorganisasi dan memiliki kartu identitas pedagang. Kelompok pedagang terpecah menjadi beberapa wadah dan membangun koneksi dengan berbagai kekuatan elit politik lokal untuk mempertahankan bisnisnya, meskipun pada akhirnya kelompok usaha kecil yang pro dengan pemerintah kota lah yang menang.⁶⁰

Malioboro kembali menjadi titik seremonial aksi politik pada momentum Pisowanan Ageng pada Oktober 2008, kala aksi massa muncul mendukung pencalonan Sultan HB X sebagai calon presiden dalam pemilu 2009. Demonstrasi kembali terjadi dengan tajuk "Sidang Rakyat" di Malioboro untuk mendesak parlemen lokal mendukung mekanisme penetapan Sultan dan Pakualam sebagai gubernur dan wakil gubernur pada 13 Desember 2010.⁶¹ Pernikahan anak HB X kembali berlangsung pada 18 Oktober 2011, di mana usaha kecil di Malioboro kembali

54 Sunaryo et al., 294.

55 Muhammad Arief Kurniawan, Endah Tisnawati, and Elsa Yuliza, "Status Dan Peran Malioboro Mall Sebagai Objek Wisata Belanja Di Kawasan Malioboro Yogyakarta," *Inersia* XIV, no. 1 (2018): 52.

56 D T Widyastuti, "Reinforcing Identity: Bringing the New Face of Malioboro Historic Place, Yogyakarta, Indonesia," *IOP Conf. Ser.: Earth Environ. Sci.*, 2020, 4.

57 Purwani, 135-136.

58 Winardi, 74.

59 Sheri L. Gibbings, "Unnamed Interests and Informal Leaders: A Street Vendor Relocation in Yogyakarta City," *Indonesia* 96 (2013): 177-185.

60 Gibbings.

61 Purwani, 17.

menyediakan makanan gratis di sepanjang jalan.⁶² Sejak tahun 2011, komunitas usaha kecil Malioboro juga membentuk Jogoboro sebagai tim pengamanan dan penjaga ketertiban turisme massal. Buruh Jogoboro direkrut dengan mekanisme *outsourcing* menjadi bagian dari UPT Malioboro.⁶³ PKL Malioboro harus mau mengikuti peraturan ketertiban yang diwadahi dalam Jogoboro, karena kelompok keamanan tersebut juga bagian dari wadah pelaku usaha kecil.⁶⁴

Seremoni politik kembali terjadi pada prosesi Syawalan tahun 2011 dan aksi massa mendesak mekanisme penetapan dalam pengisian jabatan gubernur dan wakil gubernur. Aksi massa kembali menggelar seremoni pada 10 Oktober 2012 untuk merayakan pelantikan Sultan dan Pakualam sebagai gubernur dan wakil gubernur, seluruh usaha kecil di Malioboro tutup serta menyajikan ratusan tumpeng untuk santapan bersama. Jalan Malioboro terus menjadi bagian lokasi seremonial seperti Grebeg, Sekaten, Tapa Bisu, dan lain-lain, di mana usaha kecil menjadi penopang penting penyelenggaraannya. Motif usaha kecil terlibat dalam kegiatan seremonial adalah menjaga ikatan ekonomi politiknya dengan penguasa lokal “yang sangat dihormatinya” sekaligus dianggap “melindungi” keberadaan mereka sekaligus mendapatkan manfaat dari kedatangan turis dalam acara.⁶⁵

Pekan Budaya Tionghoa Yogyakarta (PBTY) diadakan sejak tahun 2005 dan diselenggarakan setahun sekali setiap menjelang perayaan Imlek di Ketandan, Kawasan Malioboro. Festival lain seperti Peh Cun dan Tion Ciu juga diselenggarakan di

Ketandan. Pusat Seni dan Budaya Tionghoa Yogyakarta (PSBTY) didirikan pada tahun 2013 bersamaan dengan peresmian gapura pintu masuk Kampung Ketandan. Pemerintah daerah bersama PSBTY kemudian berupaya melestarikan Kawasan Pecinan di Malioboro sebagai destinasi khusus penopang ekonomi turisme.⁶⁶

Berbagai organisasi PKL yang ada pada dasarnya memberikan fasilitas pada anggotanya berupa simpan pinjam, asuransi kesehatan, dana sosial untuk pelaksanaan pengajian dan arisan serta pendampingan lainnya. Wadah organisasi PKL juga menjadi pihak yang mau memberikan bantuan permodalan bagi usaha kecil untuk menopang usahanya. Apalagi sifat usaha kecil di Malioboro sebagai bagian ekonomi informal bersifat musiman. Bisnis PKL Malioboro kurang begitu bergeliat saat musim pengunjung sepi yakni saat bulan Januari sampai Maret, sedangkan berkembang saat waktu menjelang libur pada bulan Oktober sampai Desember.⁶⁷

Pendapatan harian mereka juga bergantung pada kedatangan pengunjung saat akhir pekan, hari libur sekolah maupun cuti lebaran. Mereka yang menjadi PKL pada dasarnya tidak memiliki sumber pendapatan lainnya. Kegiatan usaha yang bersifat musiman membuat mereka mencoba bertahan dengan menambah barang dagangan hanya saat musim ramai pengunjung di Malioboro.⁶⁸ Jumlah buruh yang dipekerjakan oleh PKL Malioboro bergantung pada jenis produk yang dijual dan berkisar antara satu sampai lima pegawai. Hasil penjualan tiap hari dari usaha kecil di Malioboro bergantung pada besaran modal yang dimiliki PKL. Sumber modal PKL

62 Purwani, 135.

63 okezone.com, “Inilah Kisah Jogoboro, Sang Penjaga Malioboro,” *okezone.com*, 2016, <https://news.okezone.com/read/2016/03/29/510/1348580/inilah-kisah-jogoboro-sang-penjaga-malioboro>.

64 T Saraswati, “Empathic Urban Functions on Malioboro Street in Yogyakarta City, Indonesia,” *IOP Conf. Ser.: Earth Environ. Sci.*, 2020, 5.

65 Purwani, 130.

66 Wiwi Tjiok, “Pecinan As An Inspiration The Contribution Of Chinese Indonesian Architecture To An Urban Environment,” *Wacana* 18, No. 2 (2017): 5620564.

67 Fauzia Darojati And Alia Fajarwati, “Strategi Penghidupan Pedagang Kaki Lima Di Kawasan Malioboro, Kota Yogyakarta,” *Jurnal Bumi Indonesia*, 2014, 4-6.

68 Darojati And Fajarwati.

kebanyakan berasal dari uang mereka sendiri dan hanya sebagian kecil yang memakai pinjaman dari pihak lain.⁶⁹

Perbaikan di Kawasan Malioboro dilakukan kembali pada tahun 2005 berupa pengalihan parkir bus dan kendaraan besar di kantong parkir Abu Bakar Ali. Bus dan kendaraan besar mulai dilarang masuk Jalan Malioboro.⁷⁰ Semenjak tahun 2012 muncul wacana penataan pedestrian di Malioboro yang melibatkan pemerintah Kota Yogyakarta, pemda DIY, PT Kereta Api Indonesia dan Keraton Yogyakarta. Penataan dilakukan untuk memastikan pada tahun 2018 sampai 2020 telah terjadi perluasan kawasan pedestrian Malioboro. Malioboro akan dibagi menjadi tiga area yakni zona tanpa kendaraan bermotor, zona pedestrian penuh dan zona perdagangan umum nonpermanen. Sejak tahun 2013-2015, pemerintah Kota Yogyakarta mulai melakukan pembangunan sabuk hijau di sepanjang Malioboro dan menata pedang.⁷¹

Rencana penataan Kawasan Malioboro kembali dimulai dengan *focus group discussion* antara pemerintah daerah dengan pemangku kepentingan dan menggelar lomba desain baru Malioboro pada tahun 2014. Tahap pertama penataan Malioboro dimulai dengan mengatur trotoar dan relokasi parkir ke bagian timur kantong parkir Abu Bakar Ali. Pemerintah DIY berupaya mengembalikan fungsi trotoar bagi pejalan kaki yang selama ini digunakan oleh usaha kecil. Akhir tahun 2015, Unit Pelaksana Teknis (UPT) Malioboro mengeluarkan larangan bagi usaha parkir di sekitar Malioboro. Pertengahan tahun 2016,

penataan Malioboro mulai dieksekusi.⁷²

Realita ekonomi informal di Malioboro yang bersifat musiman pada dasarnya menunjukkan adanya kesulitan membedakan antara “yang memiliki pekerjaan” dan pengangguran. Banyak rakyat miskin seperti pelaku usaha kecil Malioboro harus mau mengatur modal yang dimilikinya sebaik mungkin dan memutar otak untuk dapat bertahan hidup. Mereka yang menjadi buruh pada usaha kecil pun pada dasarnya juga menjadi bagian dari mekanisme “pekerjaan bersama” disebabkan sebenarnya PKL dapat memperdagangkan dagangannya sendiri, karena sumber penghidupan yang sulit lah memaksa mereka harus membuka kesempatan dengan yang lain.⁷³ Keanggotaan pelaku usaha kecil dalam wadah organisasinya pun pada dasarnya sebatas menjadi solidaritas yang sempit bahkan dapat dikatakan mengarah pada sikap primordial, di mana keanggotaan dalam paguyuban menjadi ajang untuk mempertahankan bisnis di hadapan PKL dari organisasi lain. Solidaritas yang sempit semakin terlihat saat mereka masing-masing harus membangun kesetiaan dengan elit politiknya, agar selamat dari kebijakan pemda.⁷⁴

Ruang Komoditas atau Ruang Bertahan? (2016-Sekarang)

Sejak penataan trotoar tahun 2016, pelaku usaha kecil Malioboro tidak diperkenankan berdagang pada hari Selasa Wage untuk menghormati hari kelahiran Sultan HB X. Sejak hari Selasa, 26 September 2017 pelaku usaha kecil juga didorong oleh pemerintah daerah untuk membersihkan jalanan dan trotoar yang selama ini mereka gunakan sebagai tempat usaha. Selasa Wage menjadi hari jeda bagi kegiatan usaha di Malioboro,

69 Dila Damayanti And Beta Asteria, “Kajian Karakteristik Finansial Pkl Malioboro Dengan Analisis Cluster,” *Jurnal Riset Manajemen* 2, No. 2 (2015): 185-194.

70 Pratiyudha, 38.

71 F. Winarni Et Al., *Laporan Penelitian Revitalisasi Kawasan Malioboro Kota Yogyakarta Dalam Penyediaan Fasilitas Publik Untuk Mewujudkan Pelayanan Inklusif (Studi Kasus Alih Fungsi Pedestrian Area (Guiding Block) Bagi Tunanetra di Kawasan Malioboro Kota Yogyakarta)* (Yogyakarta, 2013), 46-50.

72 Pratiyudha, 38-39.

73 Jan Breman, “Labour Relations in the ‘Formal’ and ‘Informal’ Sectors: Report of a Case Study in South Gujarat, India—Part I,” *Journal of Peasant Studies* 4, no. 3 (1977): 171-205.

74 Breman.

namun tidak dengan kunjungan turis yang tetap diperbolehkan.⁷⁵ Sebanyak 2.000 orang yang bekerja sebagai PKL pada malam hari sebelum libur akan melakukan ronda untuk keesokan harinya saat Selasa Wage melakukan kerja bakti bersama. Libur tersebut muncul dari kesepakatan di antara PKL sendiri.⁷⁶

Pasca proses penataan, PKL ditempatkan pada teras Malioboro I dan II. Teras Malioboro menjadi bagian dari Kawasan *Heritage* yang menonjolkan kekhasan sosial budaya sekaligus menautkannya dengan Malioboro Mall, toko-toko dan usaha kecil yang ada di sekitarnya.⁷⁷ Malioboro kemudian secara umum telah menjadi dua bagian ruang ekonomi yakni di sisi Barat terdapat pertokoan modern sementara sisi Timur lebih banyak terdapat bangunan perhotelan dan kantor instansi pemerintah serta di sekitarnya terdapat usaha kecil.⁷⁸

Penataan Malioboro mendorong pemilik kios berani untuk mempertanyakan keberadaan PKL di depan tokonya. Bahkan terdapat pemilik kios yang menganggap bahwa tinggi lapak PKL di depan tokonya melebihi ketentuan Perwal Yogyakarta 37/2010 yang membatasi tinggi maksimal lapak sejauh 1,5 meter dan membuat etalase kiosnya tak terlihat.⁷⁹ Ketua Paguyuban Pengusaha

Malioboro (PPM) saat itu, Budhi Susilo, memilih jalur hukum dengan menggugat Walikota Yogyakarta ke PTUN Yogyakarta pada Agustus 2018 setelah surat keberatan atas keberadaan PKL tak direspon pemerintah kota dan mediasi melalui Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Yogyakarta tak berjalan dengan baik.⁸⁰

Gugatan pertama Budhi Susilo ditolak PTUN, namun tak membuat Ketua PPM tersebut gentar dan kembali melayangkan pendaftaran gugatan pada 9 Januari 2019.⁸¹ Saat sidang gugatan berlangsung, organisasi PKL Malioboro mengirimkan anggotanya di luar tempat sidang untuk menyemangati pemerintah kota, karena keputusan pengadilan menyangkut penghidupan mereka.⁸² Kejadian tersebut menunjukkan bahwa di antara pelaku usaha kecil Malioboro masih terjadi pertarungan yang cukup kuat, meskipun pengurus Pemalni mengklaim bahwa penolak keberadaan PKL hanya Budhi Susilo saja (Wawancara dengan Pengurus Pemalni pada Maret 2021).

Pasca penataan Malioboro muncul pula fenomena baru berupa pengusaha lesehan yang menjual makanan dengan harga yang tak wajar. Hal tersebut terungkap pada hari kedua Idul Fitri tahun 2017, setelah wisatawan mengunggah nota makanan di Lesehan Intan yang harganya tak wajar. Pemerintah daerah kemudian bersama paguyuban lesehan menindak pelaku usaha nakal tersebut

<https://www.tribunnews.com/regional/2017/10/17/pemilik-toko-malioboro-pertanyakan-ketinggian-dagangan-pkl>.

75 Saraswati, 7.

76 Shakyla Putri Fortunata, Putu Ratih Pertiwi, and Agus Muriawan Putra, "Identifikasi Kawasan Wisata Malioboro Berdasarkan 4a (Attraction, Amenities, Ancilliary, Accessibility)," in *Prosiding Penelitian Lapangan I Identifikasi Kepariwisata Melalui 4a di Daerah Istimewa Yogyakarta* (Bali: Program Studi Diploma Iv Pariwisata Fakultas Pariwisata Universitas Udayana, 2018), 29-30.

77 Disky Ayu Puja Lasenda, Rahmaliza, and Budi Utomo, "Manajemen Wisata Dalam Pengembangan Konservasi Kawasan Heritage (Studi Kasus: Kawasan Heritage Malioboro, Yogyakarta)," *AKSARA: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal* 8, no. 3 (2022): 2011-2012.

78 Rahmah Istiqomah, Pitaloka Ainun Yasmin, and Dian Wikananto, "Melihat Eksistensi Dan Geliat Bangunan Peninggalan Cagar Budaya : Kontestasi Pasar Beringharjo Dengan Pertokoan Modern Di Kawasan Malioboro," *Jurnal Analisa Sosiologi* 11, no. 2 (2022): 242.

79 [tribunnews.com](https://www.tribunnews.com), "Pemilik Toko Malioboro Pertanyakan Ketinggian Dagangan PKL," [tribunnews.com](https://www.tribunnews.com), 2017,

80 radarjogja.jawapos.com, "Wali Kota Jogja Digugat," radarjogja.jawapos.com, 2018, <https://radarjogja.jawapos.com/jogja-utama/2018/08/07/wali-kota-jogja-digugat/>.

81 radarjogja.jawapos.com, "Minta Trotoar Yang Dipakai PKL Dikembalikan Fungsinya, Pengusaha Malioboro Kembali Menggugat," radarjogja.jawapos.com, 2019, <https://radarjogja.jawapos.com/jogja-utama/2019/01/10/pengusaha-malioboro-kembali-menggugat/>.

82 [tagar.id](https://www.tagar.id), "Pemkot Yogyakarta Digugat Pengusaha, Ribuan PKL Pasang Badan," [tagar.id](https://www.tagar.id), 2019, <https://www.tagar.id/pemkot-yogyakarta-digugat-pengusaha-ribuan-pkl-pasang-badan>.

dan menutup usahanya selama dua hari.⁸³ Kejadian yang hampir sama terjadi lagi pada 10 September 2017, namun dibantah adanya fenomena tersebut oleh pemerintah daerah dan justru menyalahkan pengurus grup media sosial tempat wisatawan menyampaikan keluhannya.⁸⁴

Salah satu anggota Paguyuban Pedagang Pelataran (Papela) menyatakan bahwa kejadian “usaha nakal” di sekitar Malioboro dapat terjadi disebabkan pelaku usaha kecil tak punya pengetahuan yang memadai dalam penentuan harga jual dan pengambilan keuntungan. Pelaku usaha kecil menyalahkan sikap pemerintah daerah yang kurang peduli dengan nasib mereka. Pelaku usaha kecil baru akan mendapatkan fasilitasi, apabila mereka sendiri yang harus aktif berkomunikasi dengan pemerintah daerah. Bagi anggota Papela, kejadian yang ada bukanlah menaikkan harga di atas kewajaran, namun memang pelaku usaha tak pernah diberi pendampingan manajemen usaha.

“.....Pedagang itu belum tahu tentang harga jual yang baik seperti apa, biar untung atau ruginya mereka belum tahu. Jadi kadang pihak dinas tidak pernah menganggap keberadaan pedagang di Malioboro. Kalau kita tidak datang ke dinas, kita tak akan tahu programnya dan tidak difasilitasi.... Jadi itu yang membuat waktu sepi, pedagang asal memberi harga yang penting dagangannya laku, tetapi saat ramai menaikkan harga setinggi-tingginya mungkin seperti itu.... Itu tidak nuthuk itu njengkangke, karena memang pedagang tidak pernah diajari....” (Wawancara, Maret 2021).

Pengurus Pemalni yang juga Ketua Paguyuban PKL Malioboro mengklaim bahwa pihaknya sudah melakukan pertemuan setiap menjelang masa liburan untuk mencegah

terjadinya fenomena usaha nakal. Paguyuban juga mengklaim telah memberikan sanksi berupa penutupan lapak sementara waktu, bagi pelaku usaha yang nakal. Sedangkan, pengurus PPLM mengklaim bahwa pelaku usaha yang menaikkan harga secara tak wajar bukan berada di kawasan Malioboro.

PPLM sendiri sudah menekankan kepada semua pihak untuk tetap mematuhi kesepakatan paguyubannya dalam penentuan harga. Pengurus PPLM menjelaskan pula bahwa mereka yang berdagang di belakang sirip-sirip jalan wilayah Malioboro berada dalam kewenangan komunitas pedagang masing-masing kecamatan. Pengurus PPLM juga meminta wisatawan untuk melihat terlebih dahulu daftar harga makanan sebelum membeli. Komunitas usaha kecil Malioboro tak menginginkan kembali terjadi tersebarnya berita tentang usaha yang menaikkan harga di atas kewajaran yang membuat citra destinasi wisata jadi buruk dan berdampak pada bisnis mereka.⁸⁵

Pasca Orde Baru sampai dengan selesainya proyek penataan, Malioboro masih dijadikan tempat untuk berdemonstrasi khususnya di lokasi seperti kantor gubernur DIY dan DPRD dan para pedagang tak merasa terganggu dengan aktivitas seremoni politik tersebut.⁸⁶ Titik balik terjadi pasca demonstrasi menolak Rancangan Undang-Undang (RUU) Ciptakerja di depan kantor DPRD pada 8 Oktober 2020 yang berujung ricuh dan menyebabkan terbakarnya rumah makan Legian.⁸⁷ Pelaku usaha kecil Malioboro dan kelompok lain yang mengorganisasikan diri ke dalam Forum Komunikasi Ormas dan

83 detik.com, “‘Nuthuk’ Harga, Warung Lesehan Di Malioboro Ditutup,” *detik.com*, 2017, <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-3544591/nuthuk-harga-warung-lesehan-di-malioboro-ditutup>.

84 jogja.sorot.co, “Bantah Ada Pedagang Malioboro Nuthuk Harga, UPT Malioboro Salahkan Admin Grup Media Sosial,” *jogja.sorot.co*, 2017, <https://jogja.sorot.co/berita-48428-bantah-ada-pedagang-malioboro-nuthuk-harga-upt-malioboro-salahkan-admin-grup-media-sosial.html>.

85 Wawancara dengan pengurus PPLM pada Maret 2021

86 G A Cahya, Y K D Mahendra, and I I Damanik, “Malioboro as a Value of Special District of Yogyakarta City,” *3rd International Conference of Planning in the Era of Uncertainty* 70 (2017): 5-8.

87 suara.com, “Bentrokan Demo Tolak UU Ciptaker Di DIY, 9 Laporan Korban Masuk Ke Polisi,” *suara.com*, 2020, <https://jogja.suara.com/read/2020/10/17/072000/bentrokan-demo-tolak-uu-ciptaker-di-diy-9-laporan-korban-masuk-ke-polisi?page=all>.

Relawan mengancam terjadinya kericuhan.⁸⁸

Menurut Kepala Dinas Pariwisata DIY, terjadinya kericuhan pada 8 Oktober 2020 telah menyulitkan perbaikan ekonomi turisme massal yang sedang terdampak pula oleh pandemi Covid-19. Kepala Dinas Pariwisata DIY memaparkan bahwa selama masa pandemi kunjungan wisatawan setiap akhir pekan rata-rata sebanyak 20.000 orang, kericuhan menyebabkan jumlah pengunjung yang datang tiap akhir pekan menjadi 5.000 orang.⁸⁹ Pemerintah DIY kemudian mencoba merespon untuk memperbaiki kondisi ekonomi di Malioboro dengan mengeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub) DIY Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengendalian Pelaksanaan Pendapat di Muka Umum Pada Ruang Terbuka pada 4 Januari 2021.⁹⁰ Pasal 5 Pergub tersebut melarang adanya demonstrasi di Istana Negara Gedung Agung; Keraton Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat; Keraton Kadipaten Pakualaman; Kotagede; dan Malioboro; dengan radius 500 meter dari pagar atau titik terluar.⁹¹

Pergub 1/2021 kemudian berimbas pada tindakan Kepolisian Resor Kota (Polresta) Jogja untuk tidak mengizinkan aksi demonstrasi Hari Perempuan Internasional oleh Front Perjuangan Rakyat (FPR) yang akan dilakukan di Kawasan Malioboro pada 8 Maret 2021.⁹² Pelarangan demonstrasi di

Kawasan Malioboro tersebut juga berujung pada tindakan pemukulan demonstran Hari Perempuan Internasional pada 8 Maret 2021 oleh sekelompok warga.⁹³

Pengurus Pemalni menyatakan bahwa pihaknya bersama komunitas usaha kecil lainnya dilibatkan dalam pembahasan rancangan kebijakan yang kemudian disahkan menjadi Pergub 1/2021. Pengurus Pemalni menyatakan bahwa kejadian 8 Oktober 2020 telah membuat wisatawan takut berkunjung dan merusak citra Malioboro sebagai destinasi wisata. Hal tersebut menyebabkan pelaku usaha kecil Malioboro memilih untuk menyetujui larangan demonstrasi di Malioboro.

“....Kemarin itu kami pernah undang semua komunitas untuk kumpul bareng membahas keluarnya pergub nomor 1 tahun 2021 terkait objek vital yang ada di Kawasan Malioboro.... Sebelum tahun 2020, kami sebagai komunitas sering mendukung mereka melakukan demo di Malioboro, namun sejak 8 Oktober 2020 kami mulai menimbang-nimbang. Terutama karena Malioboro sudah dianggap tak nyaman oleh publik pasca pembakaran Legian..... Pada saat demonstrasi, pengunjung seringkali juga merasa tidak aman dan khawatir... Pergub masih memberi celah melakukan demo dengan mediasi mengirim maksimal lima orang, kami akan kawal dengan penjagaan ketat....” (Wawancara, Maret 2021).

Pengurus PPLM menuturkan bahwa keluarnya Pergub 1/2021 sebenarnya terkait dengan regulasi lainnya dan diklaim sebenarnya sudah menjadi pembahasan pasca demonstrasi tahun 1998. Pengurus PPLM melihat bahwa keluarnya Pergub 1/2021 pasca peristiwa 8 Oktober 2020 disebabkan karena situasi Malioboro yang sudah lebih baik dari sebelumnya. Pengurus PPLM juga menyatakan bahwa pelaku usaha kecil pada dasarnya mendukung hak mereka yang ingin menyampaikan pendapat di muka umum, tetapi harus perhatikan kepentingan “masyarakat yang lebih besar” seperti usaha

larangan-demo-di-malioboro-makan-korban-aksi-hari-perempuan-dilarang-polisi.

88 harianjogja.com, “Ormas Ini Siap Ambil Sikap Jika Aksi Unjuk Rasa Berujung Anarkistis Terjadi Di Jogja,” *harianjogja.com*, 2020, <https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2020/10/21/510/1053146/ormas-ini-siap-ambil-sikap-jika-aksi-unjuk-rasa-berujung-anarkistis-terjadi-di-jogja>.

89 ayoyogya.com, “Usai Demo Ricuh, Jumlah Pengunjung Jogja Anjlok,” *ayoyogya.com*, 2020, <https://m.ayoyogya.com/read/2020/10/13/40713/usai-demo-ricuh-jumlah-pengunjung-jogja-anjlok>.

90 tirto.id, “Banjir Kritik Atas Pergub DIY Soal Larangan Demo Di Malioboro,” *tirto.id*, 2021, <https://tirto.id/banjir-kritik-atas-pergub-diy-soal-larangan-demo-di-malioboro-f9xk>.

91 tirto.id.

92 harianjogja.com, “Pergub Larangan Demo Di Malioboro Makan Korban, Aksi Hari Perempuan Dilarang Polisi,” *harianjogja.com*, 2021, <https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2021/03/05/510/1065356/pergub->

93 gatra.com, “Demo Di Kantor Gubernur, Mahasiswa Dipukul Penentang Aksi,” *gatra.com*, 2021, <https://www.gatra.com/detail/news/505683/hukum/demo-di-kantor-gubernur-mahasiswa-dipukul-penentang-aksi>.

kecil Malioboro. Pengurus PPLM menyatakan pula bahwa para pelaku usaha kecil merasa trauma dengan kejadian 8 Oktober 2020 disebabkan tidak sedikit yang menjadi korban secara fisik maupun administratif (Wawancara, Maret 2021).

Pandemi Covid-19 yang terjadi sejak awal tahun 2020 saja sempat menyulitkan penghidupan usaha kecil disebabkan sampai membuat tak dapat membuka usaha selama pembatasan aktivitas di luar rumah. Kunjungan wisatawan yang terbatas di Malioboro pun menjadi salah satu pertimbangan pelaku usaha kecil menutup sementara usahanya untuk mencegah kerugian.⁹⁴ Pembatasan mobilitas sosial menyebabkan mereka sendiri tak mendapatkan limpahan rezeki musiman yang melimpah saat Idul Fitri, Natal dan Tahun Baru.

Pelaku usaha kecil Malioboro kemudian mencoba bertahan hidup dengan menawari pengunjung yang datang, mengatur pengeluaran harian, dan menambah pilihan produk yang dijual, saat mereka diperbolehkan kembali berdagang dengan protokol kesehatan ketat. Upaya tersebut sayangnya kurang berhasil menaikkan pendapatan disebabkan target pasar yang diutamakan terbatas kepada konsumen dari luar daerah dan masyarakat setempat memiliki persepsi bahwa harga produk di Malioboro terbilang mahal.

Pelaku usaha di Malioboro juga tak siap untuk memanfaatkan media sosial dan instrumen transaksi elektronik untuk memasarkan dagangannya disebabkan harus bergantung pada kerabat yang paham penggunaan teknologi informasi.⁹⁵ Pelaku usaha lesehan bahkan tetap memutuskan belum membuka usaha disebabkan adanya pembatasan operasional sampai jam sembilan malam, padahal mereka baru mendapat giliran

berdagang saat sore sampai malam.

Pelaku usaha kecil melalui organisasinya juga berupaya meminta bantuan permodalan kepada pemerintah daerah, namun tidak direspon dengan baik. PKL yang tergabung dalam organisasi yang memiliki koperasi seperti Tridharma, Pemalni dan PPKLY memberi keringanan anggotanya dalam mengakses pinjaman modal dan pembayaran angsuran. Nasib miris harus dirasakan oleh mereka yang tergabung dalam wadah yang tak memiliki koperasi terutama pengusaha kuliner yang harus bekerja dengan “sistem kerja bakti” dan harus memakai modal usaha untuk konsumsi rumah tangga, agar bisa bertahan hidup di tengah pandemi. Mereka juga ada yang bertahan hidup dengan berganti pekerjaan ataupun mencari sumber pendapatan tambahan.⁹⁶

Tanggal 30 Juli 2021, beberapa komunitas usaha kecil di Malioboro yang merasa tak mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah dan tercekik oleh pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM). Pelaku usaha melancarkan protes dengan memasang 50 bendera putih sebagai penanda mereka menyerah menghadapi pandemi Covid-19.⁹⁷ Pelaku usaha kecil yang melancarkan protes berasal dari Paguyuban Angkringan Padma, Paguyuban Pedagang Lesehan Malioboro, Paguyuban PPMS, dan Paguyuban Handayani. Mereka juga memprotes regulasi Pemda DIY yang menyebabkan sasaran pemberian bantuan sosial hanya kepada organisasi yang sudah berbadan hukum, padahal di Malioboro baru terdapat dua komunitas pedagang yang telah berbadan hukum.⁹⁸

⁹⁶ Eris and Sudaryono.

⁹⁷ tirta.id, “Pedagang Malioboro Pasang Bendera Putih, Terpuruk Karena PPKM,” *tirta.id*, 2021, <https://tirta.id/pedagang-malioboro-pasang-bendera-putih-terpuruk-karena-ppkm-gidE>.

⁹⁸ suara.com, “Perjuangan Pedagang Jalan Malioboro Di Tengah Impitan Ekonomi Akibat Pandemi,” *suara.com*, 2021, <https://www.suara.com/news/2021/08/10/111244/perjuangan-pedagang-jalan-malioboro-di-tengah-impitan-ekonomi-akibat-pandemi>.

⁹⁴ Igor Aviezana Eris and Sudaryono, “Upaya Adaptasi Pedagang Kaki Lima Kawasan Malioboro Di Tengah Pandemi Covid-19,” *Reka Ruang* 4, no. 2 (2021): 58-60.

⁹⁵ Eris and Sudaryono.

Malam hari tanggal 30 Juli 2021 muncul video berdurasi 45 detik dari pengurus Pemalni yang menyatakan bahwa protes dengan pemasangan bendera putih tak mewakili keinginan komunitas Malioboro. Pengurus Pemalni menyatakan bahwa protes adalah ulah pihak di luar PKL Malioboro dan memastikan bahwa pihaknya akan taat dengan arahan Sultan HB X selaku gubernur dan Raja Keraton Yogyakarta.⁹⁹ Ketua Paguyuban Tri Dharma juga mengklaim bahwa organisasinya bersama Pasar Sore, PPKLY, Pemalni dan Tri Manunggal menyatakan penolakan terhadap protes dengan pemasangan bendera putih.¹⁰⁰ Pemalni kemudian merespon dengan melakukan aksi yang dengan nama “Gerakan Nasional Bangkit Indonesiaku” pada 5 Agustus 2021 dengan memasang ratusan bendera merah putih di Jalan Malioboro untuk menunjukkan ikrar para PKL dalam bersikap pantang menyerah menghadapi pandemi.¹⁰¹

Fenomena konflik horizontal di antara pelaku usaha kecil di Malioboro maupun dengan elemen rakyat lainnya pada dasarnya menunjukkan bahwa kesadaran sebagai rakyat yang sama-sama dalam posisi rentan sulit muncul dalam lingkungan ekonomi informal. Hal tersebut terutama disebabkan oleh di antara mereka sendiri memiliki pemahaman terbatas atas moda produksi ekonomi informal yang mereka jalani sendiri apalagi sampai harus melakukan pertukaran pengetahuan dengan sesamanya maupun elemen rakyat lain sulit dilakukan.¹⁰² Para pelaku usaha kecil

di Malioboro sebagai orang yang mencari nafkah pada sektor informal pada dasarnya saling bersaing memperebutkan kebutuhan yang sama yakni pekerjaan dan peluang untuk mencari nafkah. Kombinasi dari tidak adanya waktu dan harus mempertahankan sumber penghidupan membuat para pelaku usaha kecil menjadi tak memiliki momentum untuk bersama dengan elemen rakyat lainnya saling belajar dan bersama-sama memperjuangkan jaminan kesejahteraan.¹⁰³

Pertarungan di antara pelaku usaha kecil menjadi konsekuensi pula dari sifat ekonomi informal yang mendasarkan pada fleksibilitas alias tak memiliki kerangka kerja yang jelas apalagi patokan jaminan kesejahteraan. Hal tersebut menyebabkan nasib mereka sangat didasarkan pada ketahanan pada pertarungan keras di arena pasar. Fenomena seperti itu juga konsekuensi dari mitos yang dipercaya bahwa semangat wirausaha melalui usaha kecil dapat menjadi penopang pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja, sebaliknya dorongan tersebut justru membuat masalah penghidupan dibebankan pada persaingan antara rakyat secara langsung.¹⁰⁴

Upaya pelaku usaha kecil Malioboro untuk mempertahankan citra destinasi yang nyaman dan aman pada dasarnya menjadi konsekuensi lainnya dari ekonomi informal yang tak tahan pada gejolak dan bersifat musiman. Ekonomi informal pada dasarnya sulit diprediksi dan sebagai akibat dari tidak adanya jaminan kesejahteraan, para pelaku usaha kecil harus melakukan berbagai cara termasuk dengan menggunakan cara “kekerasan” sekalipun baik secara fisik sampai dengan struktural, demi mempertahankan kelangsungan usahanya yang serba tak memiliki kepastian. Akibatnya relasi

99 krjogja.com, “Soal Bendera Putih Di Malioboro, Suara PKL ‘Terbelah,’” *krjogja.com*, 2021, <https://www.krjogja.com/berita-lokal/read/259232/soal-bendera-putih-di-malioboro-suara-pkl-terbelah>.

100 detik.com, “PKL Malioboro Terbelah, Bendera Putih Tanda Dompot Darurat Ditolak,” *detik.com*, 2021, <https://travel.detik.com/travel-news/d-5664384/pkl-malioboro-terbelah-bendera-putih-tanda-dompot-darurat-ditolak>.

101 krjogja.com, “PKL Malioboro Bentangkan Ratusan Bendera Merah Putih,” *krjogja.com*, 2021, <https://www.krjogja.com/berita-lokal/read/258854/pkl-malioboro-bentangkan-ratusan-bendera-merah-putih>.

102 Jan Breman, “Labour Relations in the ‘Formal’ and ‘Informal’ Sectors: Report of a Case Study in South

Gujarat, India. Part 2,” *Journal of Peasant Studies* 4, no. 4 (1977): 337-59.

103 Breman.

104 Jan Breman And Marcel Van Der Linden, “Informalizing The Economy: The Return Of The Social Question at A Global Level,” *Development and Change* 45, No. 5 (2014): 920-40.

mereka dengan penguasa lokal secara informal dan solidaritas sempitnya di dalam wadah organisasinya dijadikan sebagai instrumen untuk mempertahankan keberlangsungan usahanya termasuk dengan mencampuri urusan kebijakan di luar ekonomi. Di sisi lain, pihak penguasa lokal juga diuntungkan dengan relasinya bersama beberapa kelompok pelaku usaha kecil yang dapat dijadikan sebagai alat untuk “memukul” suara rakyat lainnya sekaligus klaim adanya “partisipasi” dalam kebijakan.¹⁰⁵

Kesimpulan

Kajian ini telah menunjukkan perubahan ekonomi politik usaha kecil di Malioboro yang setidaknya dapat dibagi dalam tiga fase pergulatan. *Pertama*, fase kemunculan usaha kecil dari perluasan lapak-lapak di Pasar Gedhe sejak abad ke-18 yang kemudian mengubah fungsi Malioboro tak hanya menjadi pusat seremoni budaya, melainkan juga salah satu tempat sumber ekonomi untuk rakyat bertahan hidup. Pembangunan berbagai fasilitas pada abad ke-19 diikuti oleh tumbuhnya pariwisata di Yogyakarta yang disokong oleh pemerintah kolonial semakin memicu tumbuhnya usaha kecil Malioboro, meskipun sempat alami resesi pada tahun 1930 dan saat perang kemerdekaan Indonesia.

Kedua, fase saat pemerintah baru berupaya menggeliatkan ekonomi di Malioboro pada tahun 1970-an ditandai dengan munculnya tempat penginapan baru/hotel, penataan fasilitas dan memicu tumbuhnya usaha kecil. Usaha kecil kemudian bermunculan dan berebut ruang untuk berjualan dan harus berhadapan dengan usaha kecil lain yang memiliki kios. Pasca krisis 1998, usaha kecil terus bermunculan dan mereka terus bersaing satu sama lain, meskipun juga harus menghadapi berbagai kebijakan pemda. Mereka berupaya membangun koneksi dengan

105 Jan Breman, *Social Exclusion In The Context Of Globalization* (Geneva, 2004).

kelas penguasa lokal untuk mempertahankan bisnisnya.

Ketiga, pasca penataan Malioboro pada tahun 2016 maupun kala menghadapi situasi pandemi Covid-19, strategi yang sama tetap dipakai usaha kecil saat menghadapi persaingan dengan sesamanya maupun elemen rakyat lainnya. Bahkan, demi untuk menjaga citra pariwisata baik pasca “kerusuhan” 8 Oktober 2020 dan saat pandemi rela menghadapi sesamanya dan elemen rakyat lainnya untuk mempertahankan penghidupannya.

Peneliti menyarankan kepada berbagai organisasi usaha kecil bersama elemen rakyat lainnya tidak hanya di Malioboro, tetapi juga secara luas perlu membangun pemahaman bersama tentang berbagai fungsi ruang publik. Pemerintah pusat bersama DPR RI perlu membangun cetak biru dan turunannya untuk memastikan terjadinya transformasi ekonomi untuk penguatan sektor manufaktur dan memastikan usaha kecil dan menengah yang ada mampu “naik kelas,” sehingga tak terbatas terus menjadi usaha kecil yang penuh kerentanan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, ayoyogya.com. "Usai Demo Ricuh, Jumlah Pengunjung Jogja Anjlok." *ayoyogya.com*, 2020. <https://m.ayoyogya.com/read/2020/10/13/40713/usai-demo-ricuh-jumlah-pengunjung-jogja-anjlok>.
- Brata, Aloysius Gunadi. "Vulnerability Of Urban Informal Sector: Street Vendors In Yogyakarta, Indonesia." *Theoretical and Empirical Researches in Urban Management* 14 (2010): 47-58.
- Breman, Jan. "An Informalised Labour System End of Labour Market Dualism." *Economic and Political Weekly* 36, no. 52 (2001): 4804-21.
- . "Informality: The Bane of the Labouring Poor under Globalised Capitalism." In *The Informal Economy Revisited Examining the Past, Envisioning the Future*, edited by Martha Chen and Françoise Carré, 31-38. New York: Routledge, 2020.
- . "Labour Relations in the 'Formal' and 'Informal' Sectors: Report of a Case Study in South Gujarat, India—Part I." *Journal of Peasant Studies* 4, no. 3 (1977): 171-205.
- . "Labour Relations in the 'Formal' and 'Informal' Sectors: Report of a Case Study in South Gujarat, India. Part 2." *Journal of Peasant Studies* 4, no. 4 (1977): 337-59.
- . "Social Exclusion in the Context of Globalization." Geneva, 2004.
- Breman, Jan, and Marcel van der Linden. "Informalizing the Economy: The Return of the Social Question at a Global Level." *Development and Change* 45, no. 5 (2014): 920-40.
- Cahya, G A, Y K D Mahendra, and I I Damanik. "Malioboro as a Value of Special District of Yogyakarta City." *3rd International Conference of Planning in the Era of Uncertainty* 70 (2017): 1-10.
- Carey, Peter. "Jalan Malioboro ('Jalan Berhiaskan Untaian Bunga')." In *Asal Usul Nama Yogyakarta–Malioboro*, edited by Peter Carey, 7-41. Depok: Komunitas Bambu, 2015.
- Chasdi, Richard J. "Prevention of Major Economic Disruptions Following Acts of Terrorism – The Case of the 2002 and 2005 Bali Bombings." In *Handbook of Terrorism Prevention and Preparedness*, edited by Alex P. Schmid, 985-1026. The Hague: ICCT Press, 2020.
- Damayanti, Dila, and Beta Asteria. "Kajian Karakteristik Finansial PKL Malioboro Dengan Analisis Cluster." *Jurnal Riset Manajemen* 2, no. 2 (2015): 179-97.
- Darojati, Fauzia, and Alia Fajarwati. "Strategi Penghidupan Pedagang Kaki Lima Di Kawasan Malioboro, Kota Yogyakarta." *Jurnal Bumi Indonesia*, 2014, 1-7.
- detik.com. "'Nuthuk' Harga, Warung Lesehan Di Malioboro Ditutup." *detik.com*, 2017. <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-3544591/nuthuk-harga-warung-lesehan-di-malioboro-ditutup>.
- . "PKL Malioboro Terbelah, Bendera Putih Tanda Dompot Darurat Ditolak." *detik.com*, 2021. <https://travel.detik.com/travel-news/d-5664384/pkl-malioboro-terbelah-bendera-putih-tanda-dompot-darurat-ditolak>.
- Eris, Igor Aviezena, and Sudaryono. "Upaya Adaptasi Pedagang Kaki Lima Kawasan Malioboro di Tengah Pandemi Covid-19." *Reka Ruang* 4, no. 2 (2021): 51-61.
- Fadlurrahman, Seiren Ikhtiara, Nike Mutiara Fauziah, and Amaliatulwalidain. "Mempertanyakan Pengelolaan Publicness Pada Kawasan Malioboro-Ahmad Yani Ditengah Dominasi Perekonomian." *Spirit*

- Publik* 13, no. 2 (2018): 72–83.
- Fakih, Farabi. “Keraton Dan Rakyat: Kerjasama Menuju Kemerdekaan Indonesia.” In *Gelora Di Tanah Raja: Yogyakarta Pada Masa Revolusi 1945-1949*, edited by Sri Margana, Farabi Fakih, Uji Nugroho Winardi, Wildan Sena Utama, and Galuh Ambar Sasi, 1–44. Yogyakarta: Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta bekerjasama dengan Departemen Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada, 2017.
- Fauziah, Siti Mahmudah Nur. “Dari Jalan Kerajaan Menjadi Jalan Pertokoan Kolonial: Malioboro 1756-1941.” *Lembaran Sejarah* 14, no. 2 (2018): 171–193.
- Fortunata, Shakyla Putri, Putu Ratih Pertiwi, and Agus Muriawan Putra. “Identifikasi Kawasan Wisata Malioboro Berdasarkan 4a (Attraction, Amenities, Ancilliary, Accessibility).” In *Prosiding Penelitian Lapangan I Identifikasi Kepariwisata Melalui 4A di Daerah Istimewa Yogyakarta*, 1–35. Bali: Program Studi Diploma IV Pariwisata Fakultas Pariwisata Universitas Udayana, 2018.
- gatra.com. “Demo Di Kantor Gubernur, Mahasiswa Dipukul Penentang Aksi.” *gatra.com*, 2021. <https://www.gatra.com/detail/news/505683/hukum/demo-di-kantor-gubernur-mahasiswa-dipukul-penentang-aksi>.
- Gibbins, Sheri L. “Unnamed Interests and Informal Leaders: A Street Vendor Relocation in Yogyakarta City.” *Indonesia* 96 (2013): 151–85.
- Hajibaba, Homa, Yasemin Boztug, and Sara Dolnicar. “Preventing Tourists from Canceling in Times of Crises.” *Annals of Tourism Research* 60 (2016): 48–62.
- harianjogja.com. “Ormas Ini Siap Ambil Sikap Jika Aksi Unjuk Rasa Berujung Anarkistis Terjadi Di Jogja.” *harianjogja.com*, 2020. <https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2020/10/21/510/1053146/ormas-ini-siap-ambil-sikap-jika-aksi-unjuk-rasa-berujung-anarkistis-terjadi-di-jogja>.
- . “Pergub Larangan Demo Di Malioboro Makan Korban, Aksi Hari Perempuan Dilarang Polisi.” *harianjogja.com*, 2021. <https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2021/03/05/510/1065356/pergub-larangan-demo-di-malioboro-makan-korban-aksi-hari-perempuan-dilarang-polisi>.
- Istiqomah, Rahmah, Pitaloka Ainun Yasmin, and Dian Wikananto. “Melihat Eksistensi Dan Geliat Bangunan Peninggalan Cagar Budaya : Kontestasi Pasar Beringharjo Dengan Pertokoan Modern Di Kawasan Malioboro.” *Jurnal Analisa Sosiologi* 11, no. 2 (2022): 229–50.
- jogja.sorot.co. “Bantah Ada Pedagang Malioboro Nuthuk Harga, UPT Malioboro Salahkan Admin Grup Media Sosial.” *jogja.sorot.co*, 2017. <https://jogja.sorot.co/berita-48428-bantah-ada-pedagang-malioboro-nuthuk-harga-upt-malioboro-salahkan-admin-grup-media-sosial.html>.
- krjogja.com. “PKL Malioboro Bentangkan Ratusan Bendera Merah Putih.” *krjogja.com*, 2021. <https://www.krjogja.com/berita-lokal/read/258854/pkl-malioboro-bentangkan-ratusan-bendera-merah-putih>.
- . “Soal Bendera Putih Di Malioboro, Suara PKL ‘Terbelah.’” *krjogja.com*, 2021. <https://www.krjogja.com/berita-lokal/read/259232/soal-bendera-putih-di-malioboro-suara-pkl-terbelah>.
- Kurniawan, Muhammad Arief, Endah Tisnawati, and Elsa Yuliza. “Status Dan Peran Malioboro Mall Sebagai Objek Wisata Belanja di Kawasan Malioboro

- Yogyakarta.” *Inersia* XIV, no. 1 (2018): 75–89.
- Lasenda, Disky Ayu Puja, Rahmaliza, and Budi Utomo. “Manajemen Wisata Dalam Pengembangan Konservasi Kawasan Heritage (Studi Kasus: Kawasan Heritage Malioboro, Yogyakarta).” *AKSARA: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal* 8, no. 3 (2022): 2003–20.
- Marwahid, Hasbi. “Membangun Kembali Pariwisata Yogyakarta: Strategi Dan Upaya Pemerintah Melalui Badan Tourisme (BATOURE) 1954-1959.” *Jurnal Penelitian Sejarah dan Budaya* 8, no. 1 (2022): 105–34.
- Nugraheni, Ari, Rahmat Nurcahyo, and Djoko Sihono Gabriel. “Certification of Tourism Business Standards and CHSE Standards in Indonesia.” In *Proceedings of the International Conference on Industrial Engineering and Operations Management Istanbul, Turkey, March 7-10, 2022*, 239–50. Istanbul, 2022.
- okezone.com. “Inilah Kisah Jogoboro, Sang Penjaga Malioboro.” *okezone.com*, 2016. <https://news.okezone.com/read/2016/03/29/510/1348580/inilah-kisah-jogoboro-sang-penjaga-malioboro>.
- Popescu, Liliana. “Safety and Security in Tourism. Case Study: Romania.” *Forum Geografic. S.C.G.P.M* 10, no. 2 (2011): 322 – 328.
- Pratiyudha, Pinurba Parama. “Participation Of Malioboro’s Parking Attendants Relocation In Right To The City Perspective.” *Jurnal Pengembangan Kota* 8, no. 1 (2020): 33–47.
- Purwani, Ofita. *Javanese Power; Silent Ideology And Built Environment Of Yogyakarta And Surakarta*. The University of Edinburgh, 2014.
- Purwanto, Edi, A.Djunaedi, Sudaryono, and B.Hari Wibisono. “Mengelola Konflik Pemanfaatan Ruang Berbasis Nilai Lokal Ruang Kota Koridor Jalan Malioboro - Kota Jogjakarta.” *Tata Loka* 14, no. 3 (2012): 171–85.
- Quiroz-Becerra, M. Victoria. “Street Vendors Claiming Respect and Dignity in the Neoliberal City.” In *Immigrant Women Workers in the Neoliberal Age*, edited by Nilda Flores-González, Anna Romina Guevarra, Maura Toro-Morn, and Grace Chang, 19–38. Illinois: Board of Trustees of the University of Illinois, 2013.
- radarjogja.jawapos.com. “Minta Trotoar Yang Dipakai PKL Dikembalikan Fungsinya, Pengusaha Malioboro Kembali Menggugat.” *radarjogja.jawapos.com*, 2019. <https://radarjogja.jawapos.com/jogjaraya/2019/01/10/pengusaha-malioboro-kembali-menggugat/>.
- . “Wali Kota Jogja Digugat.” *radarjogja.jawapos.com*, 2018. <https://radarjogja.jawapos.com/jogja-utama/2018/08/07/wali-kota-jogja-digugat/>.
- Richter, Max M. *Musical Worlds in Yogyakarta*. Leiden: KITLV Press, 2012.
- Rindrasih, Erda. “Tourists’ Perceived Risk and Image of Destinations Prone to Natural Disasters: The Case of Bali and Yogyakarta, Indonesia.” *Humaniora* 30, no. 2 (2018): 192–203.
- Rindrasih, Erda, Patrick Witte, Tejo Spit, and Annelies Zoomers. “Tourism and Disasters: Impact of Disaster Events on Tourism Development in Indonesia 1998-2016 and Structural Approach Policy Responses.” *Journal of Service Science and Management* 12 (2019): 93–115.
- Saraswati, T. “Empathic Urban Functions on Malioboro Street in Yogyakarta City, Indonesia.” *IOP Conf. Ser.: Earth Environ.*

- Sci., 2020, 1-9.
- Sasi, Galuh Ambar. "Di Tanah Kiblik: Perempuan Yogyakarta Dalam Gemerlap Revolusi." In *Gelora Di Tanah Raja: Yogyakarta Pada Masa Revolusi 1945-1949*, edited by Sri Margana, Farabi Fakhri, Uji Nugroho Winardi, Wildan Sena Utama, and Galuh Ambar Sasi, 177-213. Yogyakarta: Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta bekerjasama dengan Departemen Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada, 2017.
- Sönmez, Sevil F. "Tourism, Terrorism and Political Instability." *Annals of Tourism Research* 25, no. 2 (1998): 416-56.
- suara.com. "Bentrok Demo Tolak UU Ciptaker di DIY, 9 Laporan Korban Masuk Ke Polisi." *suara.com*, 2020. <https://jogja.suara.com/read/2020/10/17/072000/bentrok-demo-tolak-uu-ciptaker-di-diy-9-laporan-korban-masuk-ke-polisi?page=all>.
- . "Perjuangan Pedagang Jalan Malioboro Di Tengah Impitan Ekonomi Akibat Pandemi." *suara.com*, 2021. <https://www.suara.com/news/2021/08/10/111244/perjuangan-pedagang-jalan-malioboro-di-tengah-impitan-ekonomi-akibat-pandemi>.
- Sunaryo, Rony Gunawan, Nindy Soewarno, Ikaputra, and Bakti Setiawan. "The Transformation Of Urban Public Space In Yogyakarta A Search for Specific Identity & Character." In *Insular Diversity : Architecture - Culture - Identity in Indonesia*, edited by Erich Lehner, Irene Doubrawa, and Ikaputra, 283-98. Vienna: IVA-ICRA, Institute for Comparative Research in Architecture, Vienna, Austria and Department of Architecture and Planning, Gadjah Mada University Yogyakarta, Indonesia, 2013.
- tagar.id. "Pemkot Yogyakarta Digugat Pengusaha, Ribuan PKL Pasang Badan." *tagar.id*, 2019. <https://www.tagar.id/pemkot-yogyakarta-digugat-pengusaha-ribuan-pkl-pasang-badan>.
- Timothy, Dallen J., and Geoffrey Wall. "Selling To Tourists Indonesian Street Vendors." *Annals of Tourism Research* 24, no. 2 (1997): 322-40.
- Timothy, Dallen J. "Safety and Security Issues in Tourism." In *Tourism Management Dynamics*, edited by Dimitrios Buhalis and Carlos Costa, 1st ed., 19-27. London: Routledge, 2005.
- tirto.id. "Banjir Kritik Atas Pergub DIY Soal Larangan Demo Di Malioboro." *tirto.id*, 2021. <https://tirto.id/banjir-kritik-atas-pergub-diy-soal-larangan-demo-di-malioboro-f9xk>.
- . "Pedagang Malioboro Pasang Bendera Putih, Terpuruk Karena PPKM." *tirto.id*, 2021. <https://tirto.id/pedagang-malioboro-pasang-bendera-putih-terpuruk-karena-ppkm-gidE>.
- Tjiook, Wiwi. "Pecinan as an Inspiration The Contribution of Chinese Indonesian Architecture to an Urban Environment." *Wacana* 18, no. 2 (2017): 556-80.
- tribunnews.com. "Pemilik Toko Malioboro Pertanyakan Ketinggian Dagangan PKL." *tribunnews.com*, 2017. <https://www.tribunnews.com/regional/2017/10/17/pemilik-toko-malioboro-pertanyakan-ketinggian-dagangan-pkl>.
- Usman, Sunyoto, Didik Kristiadi, Widodo D. Pramono, Rita Lismiati, Syafarudin Alwi, Agung Rudianto, Bayu Yanuargi, and Indah Suryo Wardhani. *Malioboro*. Edited by Sunyoto Usman. Yogyakarta: PT. Mitra Tata Persada dan Bappeda Kota Yogyakarta, 2006.
- Wibisono, Bambang Hari. *Transformation of Jalan Malioboro, Yogyakarta: The Morphology*

and Dynamics of a Javanese Street. The University of Melbourne, 2001.

Widyastuti, D T. "Reinforcing Identity: Bringing the New Face of Malioboro Historic Place, Yogyakarta, Indonesia." *IOP Conf. Ser.: Earth Environ. Sci*, 2020, 1-10.

Winardi, Uji Nugroho. "Rakyat Bergerak, Djogja Bergelora: Mobilisasi Tenaga Perang Masa Revolusi." In *Gelora Di Tanah Raja: Yogyakarta Pada Masa Revolusi 1945-1949*, edited by Sri Margana, Farabi Fakhri, Uji Nugroho Winardi, Wildan Sena Utama, and Galuh Ambar Sasi, 73-123. Yogyakarta: Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta bekerjasama dengan Departemen Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada, 2017.

Winardi, Uji Nugroho, M. Nazir Salim, Wildan Sena Utama, and Farabi Fakhri. *Jogja Memilih: Sejarah Pemilu 1951 dan 1955 di Yogyakarta*. Edited by Galih Adi Utama. Yogyakarta: Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta, 2018.

Winarni, F., Marita Ahdiyana, Kurnia Nur Fitriana, Fariz Afifah, and Ardiansyah Fajar Riyadi. *Laporan Penelitian Revitalisasi Kawasan Malioboro Kota Yogyakarta Dalam Penyediaan Fasilitas Publik Untuk Mewujudkan Pelayanan Inklusif (Studi Kasus Alih Fungsi Pedestrian Area (Guiding Block) Bagi Tunanetra Di Kawasan Malioboro Kota Yogyakarta)* Yogyakarta, 2013.

Yap, Ghialy, and Shrabani Saha. "Do Political Instability, Terrorism, And Corruption Have Detering Effects On Tourism Development Even In The Presence Of Unesco Heritage? A Cross-Country Panel Estimate." *Tourism Analysis* 18, no. 5 (2013): 587-99.